

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Setiap orang selalu menginginkan kemajuan dalam segala hal. Secara naluri semua makhluk hidup bergerak maju ke depan ketika berjalan. Ini menandakan kondisi kesehatan makhluk tersebut secara normal. Begitu juga dengan sebuah negara, ketika pergerakannya maju maka menjadi satu tanda bahwa negara tersebut dalam kondisi yang baik. Untuk menjadi negara maju merupakan tantangan bagi setiap negara. Karena banyak hal-hal yang harus dipenuhi untuk mencapai level sebuah negara maju dan banyak tantangan bagi suatu negara yang selalu harus dihadapi, tidak semua negara bisa menjadi negara maju dengan mudah. Di antara masalah yang menghambat suatu negara mencapai kategori negara maju adalah kemiskinan.

Dalam perjalanannya setiap negara selalu berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya dengan menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Bahkan Indonesia telah melalui perjalanan panjang pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Ini merupakan satu bentuk kemajuan yang diharapkan. Akan tetapi, Indonesia tidak serta merta dikatakan berhasil dalam kehidupan sosial dan ekonominya secara total dengan pertumbuhan ini. Pasalnya, pertumbuhan yang telah diperoleh menorehkan ketimpangan yang semakin melebar.

Ketimpangan pendapatan merupakan isu sosial dan ekonomi yang terus menjadi perhatian global, khususnya negara berkembang termasuk Indonesia. Ketimpangan pendapatan menjadi salah satu masalah utama dari suatu negara yang penyelesaiannya merupakan salah satu dari tujuh peran negara dalam kehidupan perekonomiannya.¹ Ketimpangan pendapatan adalah kondisi di mana pendapatan tidak terdistribusi secara merata di antara populasi, baik antar individu ataupun

¹ Hossein Askari, Zamiri Iqbal, Abbas Mirakhor, et al., *Introduction to Islamic Economic* (Singapore: John Wiley & Sons Singapore Pte. PT, 2015), 220.

kelompok masyarakat². Ketimpangan yang tinggi mengganggu stabilitas ekonomi dan sosial. Ini dapat menyebabkan ketidakpuasan sosial dan konflik, yang dapat mengganggu stabilitas politik dan ekonomi.³ Ketimpangan pendapatan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ketika sebagian besar pendapatan terkonsentrasi pada segelintir orang, daya beli masyarakat secara keseluruhan akan menurun sehingga dapat mengurangi permintaan agregat⁴. Selain itu, ketimpangan juga menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi ekonomi dan politik.⁵

Secara global, ketimpangan yang terjadi sangat mencolok secara historis, di mana 10% penduduk terkaya dunia menguasai 50–60% dari total pendapatan, sementara 50% termiskin hanya menerima 5–10%.⁶ Di Indonesia sendiri, diungkapkan bahwa kekayaan 50 orang terkayanya setara dengan total kekayaan 50 juta orang miskin di negara ini. Hal ini menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan yang sangat tinggi, di mana segelintir individu menguasai sebagian besar sumber daya ekonomi, sementara sebagian besar populasi masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.⁷ Ini yang menyebabkan ketimpangan pendapatan selalu menjadi pembahasan menarik.

Koefisien Gini atau Rasio Gini adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan.⁸ Dalam suatu populasi, Rasio Gini adalah ukuran yang umum digunakan untuk mengetahui tingkat ketimpangan dalam distribusi

² Alessandra Basso. dan Chiara Lisciandra, *Models and measurement of inequality*. (United Kingdom: University of Vienna, 2024) 511–524.

³ M. W. Askar, G. D. Muhammad, J. D. Achmad, dan H. Imaduddin, *Laporan Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2024: "Pesawat Jet untuk Si Kaya, Sepeda untuk Si Miskin"* (Bandung: Center of Economic and Law Studies/Celios", 2024), 13. Retrieved from <https://www.celios.co.id>

⁴ Askar, Muhammad, Achmad, dan Imaduddin, "*Laporan Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2024: Pesawat Jet untuk Si Kaya, Sepeda untuk Si Miskin*", 15.

⁵ T. L. Ho, L. H. Ngoc, dan T. H. Ho, *Digital Inclusion or Exclusion?* (– dalam *Research in Globalization*), (–: –Penerbit–, 2025), 16. <https://doi.org/10.1016/j.resglo.2025.100283>

⁶ "Lucas Chancel & Thomas Piketty, *Global Income Inequality, 1820–2020: The Persistence and Mutation of Extreme Inequality*", (Paris: World Inequality Lab Working Paper No. 2021/19, 2021), 6. <https://shs.hal.science/halshs-03321887v1>

⁷ Askar, Muhammad, Achmad, dan Imaduddin, *Laporan Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2024: Pesawat Jet untuk Si Kaya, Sepeda untuk Si Miskin*, 8.

⁸ Zachary Parolin, Lars Lehner, dan Nikolai Wilmers, *Declining Earnings Inequality, Rising Income Inequality* (Journal of Public Economics, Vol. 244, 2025), 3. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2025.105337>

pendapatannya. Nilai 0 menunjukkan pemerataan sempurna, sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan ekstrem.⁹ Jika semua orang memiliki pendapatan yang sama, itu disebut pemerataan sempurna; jika tidak, satu orang memiliki semua pendapatan sementara yang lain tidak memiliki apa-apa¹⁰. Dari sini Rasio Gini memberikan wawasan tentang bagaimana pendapatan terbagi di antara penduduk.

Rasio Gini memiliki peranan penting dalam analisis ekonomi dan sosial karena memberikan gambaran yang jelas tentang seberapa merata atau tidak meratanya distribusi pendapatan di suatu negara atau wilayah. Dengan menggunakan Rasio Gini, para peneliti dan pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi tingkat ketimpangan pendapatan di suatu daerah. Ketimpangan yang tinggi mengindikasikan adanya masalah sosial dan ekonomi yang lebih besar, seperti kemiskinan dan ketidakadilan. Selain itu Rasio Gini juga berguna untuk memonitor perubahan dalam distribusi pendapatan dari waktu ke waktu.¹¹ Dengan membandingkan Rasio Gini dari tahun ke tahun, para peneliti dapat mengevaluasi efektivitas kebijakan yang diterapkan untuk mengurangi ketimpangan¹².

Dalam konteks penelitian ilmiah, sebagaimana yang disampaikan Reka Ramadhan dalam jurnal "Pengaruh Tingkat Ketimpangan (Rasio gini) terhadap Indeks Pembangunan Manusia," penggunaan rasio gini membantu menganalisis dampak ketimpangan terhadap indeks pembangunan manusia¹³. Studi ini

⁹ Luis Ezquerro, Juan Gómez-Miñambres, N. Jimenez, dan P. Kujal, "The Effect of Wage Proposals on Efficiency and Income Distribution (Journal of Economic Behavior and Organization)", (2023), 472. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2023.10.006>. Askar, Muhammad, Achmad, dan Imaduddin, "Laporan Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2024: Pesawat Jet untuk Si Kaya, Sepeda untuk Si Miskin", 8.

¹⁰ "Natasya Anggraini, Purbayu Budi Santosa, dan Putri Rizka Citaningati, *Pengaruh Islamic Human Development Index, Pengangguran, Ketimpangan Pendapatan, dan Upah Minimum Kabupaten Terhadap Kemiskinan (Studi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2009 – 2022)*". ("Surakarta: "Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol.10(03), 2024), 3144. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i3.15079>"

¹¹ Anggraini, Santosa, dan Citaningati, "Pengaruh Islamic Human Development Index, Pengangguran, Ketimpangan Pendapatan, dan Upah Minimum Kabupaten Terhadap Kemiskinan (Studi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2009 – 2022)". 3145–3147. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i3.15079>

¹² Chang, N., Boediono, P., & Widianingsih, L. P. (2025). Determinan makroekonomi dan pajak daerah terhadap ketimpangan ekonomi: Pengaruh UMR, IPM, pekerjaan formal, populasi, dan pajak daerah terhadap ketimpangan ekonomi. *Media Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, 6(2).

¹³ Ni Nyoman Reka Ramadhan, *Pengaruh Tingkat Ketimpangan (Gini Ratio) terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2022* (Jurnal Bisnis dan Manajemen West Science, Vol. 3 No. 1, Februari 2024), 108–118.

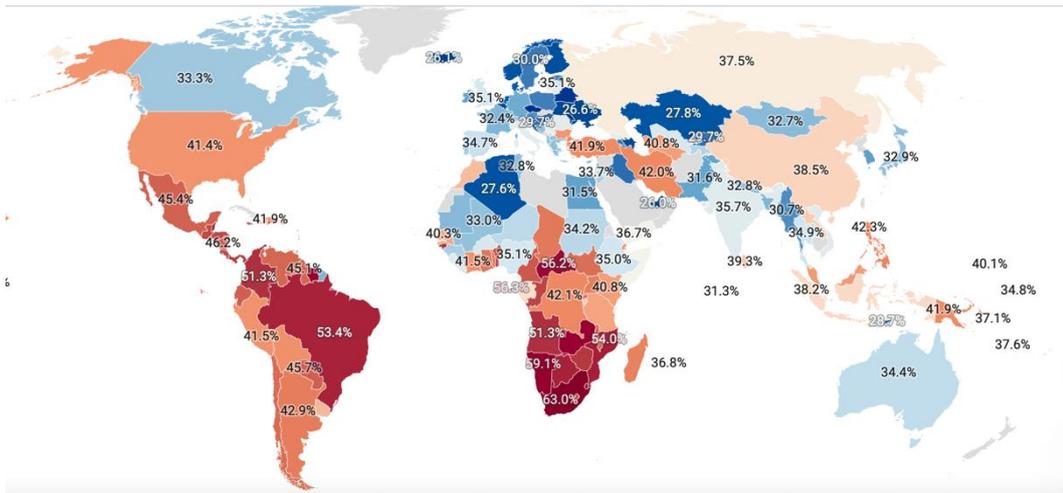
menunjukkan bahwa ketimpangan yang tinggi dapat berdampak negatif pada kualitas hidup masyarakat.

Salah satu aspek menarik dari Rasio Gini adalah kemampuannya untuk memberikan wawasan yang lebih dalam tentang dinamika sosial dan ekonomi di suatu negara. Misalnya, meskipun dua negara mungkin memiliki tingkat pendapatan yang sama, Rasio Gini dapat menunjukkan bahwa satu negara memiliki distribusi pendapatan yang lebih merata dibandingkan negara lainnya. Hal ini menunjukkan stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang di negara tersebut. Dalam penggunaannya dalam penelitian lintas negara, Rasio Gini dapat membandingkan ketimpangan pendapatan di berbagai negara, sehingga memberikan perspektif global tentang isu ketimpangan dan kemiskinan. Ini menjadikannya alat yang sangat berharga dalam analisis ekonomi dan sosial.¹⁴

Dalam analisis distribusi pendapatan, Bank Dunia menggunakan tiga metode pertumbuhan penduduk: rendah, sedang, dan tinggi¹⁵. Hal ini membantu dalam memahami bagaimana ketimpangan dapat berdampak lebih mendalam pada keadilan sosial. Tingkat ketimpangan pendapatan berbeda-beda di setiap negara. Biasanya di negara-negara maju memiliki ketimpangan pendapatan yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara berkembang. Begitu juga negara-negara berkembang biasanya memiliki ketimpangan pendapatan yang relatif rendah jika dibandingkan dengan negara-negara kurang berkembang. Berikut gambaran persebaran tingkat ketimpangan di negara-negara:

¹⁴ Anggraini, Santosa, dan Citaningati, *Pengaruh Islamic Human Development Index, Pengangguran, Ketimpangan Pendapatan, dan Upah Minimum Kabupaten Terhadap Kemiskinan (Studi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2009 - 2022)*. 3148–3149. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i3.15079>

¹⁵ H. Syamsuddin Hm, *Perhitungan Indeks Gini Ratio dan Analisis Kesenjangan Distribusi Pendapatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006–2010* (Jurnal Paradigma Ekonomika, 2011)



Gambar 1.1 sebaran tingkat ketimpangan pendapatan setiap negara, Source: <https://www.datapandas.org/ranking/gini-coefficient-by-country>

Dari gambar di atas terlihat jelas bahwa negara-negara maju memiliki ketimpangan pendapatan lebih kecil yang diwakili dengan warna biru. Sedangkan negara-negara kurang berkembang atau negara-negara dengan tingkat kemiskinan tinggi yang ditunjukkan oleh warna merah memiliki ketimpangan pendapatan yang tinggi. Berikut data ketimpangan negara-negara maju dan negara kurang berkembang pada 2024 yang ditunjukkan dengan angka rasio gini masing-masing negara:¹⁶

¹⁶ <https://www.datapandas.org/ranking/gini-coefficient-by-country>

Tabel 1.1 data ketimpangan negara-negara maju, Sumber: www.datapandas.org

No.	Negara dengan Rasio gini rendah	Rasio Gini
1	Slovenia	0,246
2	Czech Republic	0,25
3	Belarus	0,253
4	Moldova	0,257
5	United Arab Emirates	0,26
6	Iceland	0,261
7	Azerbaijan	0,266
8	Ukraine	0,266
9	Belgium	0,272
10	Finland	0,273
11	Norway	0,276
12	Algeria	0,276
13	Kazakhstan	0,278
14	Netherlands	0,281
15	Denmark	0,282

Tabel 1.2 data ketimpangan negara-negara kurang berkembang, Sumber: www.datapandas.org

No.	Negara dengan Rasio gini tinggi	Rasio Gini
1	South Africa	0,63
2	Namibia	0,591
3	Suriname	0,579
4	Zambia	0,571
5	Sao Tome and Principe	0,563
6	Central African Republic	0,562
7	Eswatini	0,546
8	Mozambique	0,54
9	Brazil	0,534
10	Botswana	0,533

Di negara-negara maju, ketimpangan pendapatan umumnya relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Dari data di atas dapat dilihat beberapa negara maju dengan ketimpangan pendapatannya yang rendah. Norwegia

misalnya, pada tahun 2019 negara ini pernah mengalami kesenjangan pendapatan yang paling kecil selama lebih dari dua dekade terakhir dengan angka rasio gini sebesar 0,227. Negara Islandia juga merupakan salah satu negara maju dengan angka rasio gini yang kecil. Pada tahun 2017 negara ini memiliki rasio gini sebesar 0,261. Berikutnya ada Finlandia, negara dengan sistem Pendidikan terbaik di dunia. Negara ini juga merupakan negara maju yang memiliki kesenjangan pendapatan yang cukup kecil. Finlandia hanya memiliki rasion gini sebesar 0,271 pada tahun 2020.¹⁷ Swedia, negara yang dikenal dengan sistem sosialnya yang kuat juga memiliki rasio gini yang kecil sekitar 0,27 pada tahun 2020¹⁸. Contoh lainnya adalah Jerman. Dengan rasio sini sekitar 0,29 pada tahun 2020, Jerman memiliki kesetaraan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Amerika Serikat¹⁹.

Di samping itu, ada juga beberapa negara maju yang pernah mengalami ketimpangan yang cukup tinggi. Diantara negara-negara ini adalah: Amerika Serikat, Hongkong, dan Singapura. Meskipun Amerika Serikat merupakan negara maju, tetapi rasio gininya pada tahun 2020 relatif tinggi yaitu sekitar 0,41. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan pendapatan yang besar.²⁰ Hongkong juga merupakan negara maju yang memiliki kesenjangan pendapatan besar di negaranya. Tercatat pada tahun 2016 Hongkong memiliki rasio gini yang tinggi sebesar 0,539. Padahal Hongkong memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang sangat tinggi mencapai 0,91.²¹ Selain Amerika Serikat dan Hongkong, negara maju yang memiliki tingkat ketimpangan cukup besar adalah Singapura. Tidak jauh berbeda dengan Hongkong, Singapura termasuk salah satu negara maju yang memiliki rasio gini yang masih cukup tinggi sebesar 0,459.²²

¹⁷ “World Population Review: <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/gini-coefficient-by-country>”

¹⁸ “<https://ekon.go.id/publikasi/detail/6056/optimis-capai-pertumbuhan-ekonomi-8-menko-airlangga-himbau-kepala-daerah-dorong-hilirisasi-serta-menurunkan-tingkat-kemiskinan-dan-rasio-gini>”

¹⁹ <https://www.ums.ac.id/berita/teropong-jagat/menakar-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2025>

²⁰ <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Komisi-XI-Sepakati-Asumsi-Dasar-APBN-2025>

²¹ World Population Review: <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/gini-coefficient-by-country>

²² World Population Review: <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/gini-coefficient-by-country>

Sementara itu, negara berkembang sering menghadapi tantangan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Misalnya seperti Indonesia sendiri, rasio gini Indonesia berada di sekitar 0,38 pada tahun 2022. Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui program pembangunan ekonomi yang komprehensif, termasuk memanfaatkan sumber daya alam hilir untuk menambah nilai produk dalam negeri²³. India adalah negara berkembang berikutnya. Meskipun populasinya besar dan ekonominya tumbuh cepat, India masih menghadapi kesenjangan pendapatan yang besar. Rasio gini tahun lalu di India berada di angka 0,35.²⁴ Selain dua negara tadi, ada Brazil yang masuk ke dalam kategori negara berkembang. Negara yang telah memiliki IPM tinggi ini masih memiliki tingkat kesenjangan yang tinggi. Pada tahun 2021 Brazil memiliki rasio gini yang tinggi sebesar 0,529.

Adapun negara-negara kurang berkembang sering menghadapi tantangan yang signifikan dalam hal kesetaraan pendapatan. Afrika Selatan adalah contoh negara paling kurang berkembang dengan tingkat ketimpangan yang sangat tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, Rasio ginya sekitar 0,63. Ini menunjukkan betapa besarnya perbedaan antara kelompok sosial. Negara kurang berkembang lainnya, yang merupakan negara dengan rasio gini yang tinggi adalah Namibia. Pada tahun 2015, negara Namibia memiliki rasio gini sebesar 0,591. Artinya tingkat ketimpangan di negara ini masih sangat tinggi. Contoh terakhir negara kurang berkembang yang memiliki rasio gini tinggi adalah Suriname. Suriname memiliki rasio gini tinggi di angka 0,579 pada tahun 1999.²⁵

Rasio gini menurut provinsi di Indonesia merupakan alat penting untuk memahami distribusi pendapatan dan ketimpangan ekonomi di tingkat lokal. Data ini tidak hanya menunjukkan seberapa meratanya pendapatan didistribusikan, tetapi

²³ Wahyu Wijayanto, *Pengembangan Sektor Industri Dalam RPJMN dan RPJPN Menuju Indonesia Emas 2045 yang Berkelanjutan* (Jakarta: Direktorat Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas, 2024), <https://indonesia2045.go.id/>

²⁴ Kementerian PPN/Bappenas, *Konsep Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025–2029* (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2025),

²⁵ World Population Review: <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/gini-coefficient-by-country>

juga memberikan wawasan tentang efektivitas kebijakan pemerintah untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.

Rasio gini setiap provinsi sangat penting karena memungkinkan pemerintah mengambil tindakan yang lebih terarah terhadap ketimpangan. Misalnya, pada bulan Maret 2023, Rasio gini DI Yogyakarta merupakan yang tertinggi di Indonesia yaitu sebesar 0,449, yang menunjukkan adanya ketimpangan yang signifikan sehingga memerlukan perhatian khusus²⁶. Sementara, Provinsi Bangka Belitung pada Maret 2023 memiliki angka Rasio Gini terendah sebesar 0,245²⁷, yang menunjukkan distribusi pendapatan yang lebih merata.

Dalam studi akademis tentang distribusi pendapatan regional di Indonesia, penggunaan data rasio gini telah membantu menganalisis dampak sistem pajak terhadap masyarakat lokal. Hal ini didukung oleh laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang secara berkala menerbitkan data ini untuk setiap Provinsi²⁸. Ketika suatu negara mengetahui angka rasio gini di setiap provinsinya paling tidak terdapat dua keuntungan yang bisa diperoleh, pertama perumusan kebijakan daerah. Dengan memahami tingkat ketimpangan di setiap daerah, pemerintah dapat mengembangkan program-program khusus untuk meningkatkan keseimbangan ekonomi dan sosial. Keuntungan kedua, mengevaluasi Efektivitas Program. Data rasio gini di setiap provinsi dapat membantu mengevaluasi apakah kebijakan yang diterapkan efektif dalam mengurangi ketimpangan atau tidak. Misalnya, rasio gini Jawa Timur adalah 0,3872 pada Maret 2023²⁹. Artinya, meskipun terjadi peningkatan dibanding periode sebelumnya (September 2022), pemerintah daerah masih perlu bekerja keras agar distribusi pendapatan lebih merata.

²⁶ <https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/cf3ba28fca4fd79/10-provinsi-dengan-ketimpangan-tertinggi-pada-maret-2023-yogyakarta-masih-pertama>

²⁷ <https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/cf3ba28fca4fd79/10-provinsi-dengan-ketimpangan-tertinggi-pada-maret-2023-yogyakarta-masih-pertama>

²⁸ <https://www.bps.go.id/api/statistics-table/2/OTgjMg==/gini-rasio--maret-2024.html>

²⁹ <https://bappeda.jatimprov.go.id/2023/07/18/gini-ratio-jawa-timur-maret-2023-tercatat-sebesar-0387/>

Ketimpangan dalam distribusi pendapatan di suatu negara atau wilayah, secara umum, dipengaruhi oleh variable-variabel ekonomi dan sosial.³⁰ Celios mengatakan ketimpangan pendapatan di Indonesia terjadi karena beberapa faktor, di antaranya adalah pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, karena manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang signifikan tersebut tidak dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menyebabkan kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Ketidaksetaraan terhadap akses pendidikan dan layanan kesehatan juga menjadi penyebab ketimpangan pendapatan. Siklus kemiskinan cenderung berlanjut di kalangan masyarakat yang tidak memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan tinggi. Selain itu, kebijakan ekonomi yang tidak inklusif atau tidak mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang lebih miskin dapat memperburuk ketimpangan. Misalnya, kebijakan perpajakan yang tidak progresif dapat menguntungkan kelompok kaya dan merugikan kelompok miskin.³¹ Begitu juga dengan kebijakan terkait UMR, jika mempertimbangkan kebutuhan masyarakat maka kebijakan yang dibuat dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mengurangi jurang ekonomi antara pekerja formal dan informal. Inilah mengapa UMR menjadi kebijakan protektif untuk meningkatkan daya beli dan mengurangi kemiskinan. Maka penting untuk membahas faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketimpangan di Indonesia ini.

Faktor pertama adalah pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Tidak meratanya pertumbuhan ekonomi dapat menyebabkan kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Pertumbuhan ekonomi secara umum diukur dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Nilai total barang dan jasa yang diproduksi suatu negara selama periode waktu tertentu dan biasanya satu tahun, itulah yang disebut dengan PDB. PDB dikatakan dapat mencerminkan ukuran aktivitas ekonomi dan merupakan indikator penting untuk menilai kesehatan ekonomi suatu negara.³² PDB mencakup semua aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh individu

³⁰ Muhammad Farhan, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa*. (Indonesia: Sibatik Journal, 2022)

³¹ Askar, Muhammad, Achmad, dan Imaduddin, *Laporan Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2024: Pesawat Jet untuk Si Kaya, Sepeda untuk Si Miskin*, 7-11. Retrieved from <https://www.celios.co.id>

³² Meyliana & Mulazid, *Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB), Jumlah Bagi Hasil, dan Jumlah Kantor terhadap Jumlah Deposito Mudārabah Bank Syariah di Indonesia Periode 2011–2015*

dan perusahaan di dalam batas geografis suatu negara, tanpa memperhatikan apakah faktor produksi tersebut dimiliki oleh penduduk lokal atau asing.³³ PDB terdiri dari beberapa komponen utama, termasuk: ekspor neto (selisih antara ekspor dan impor barang dan jasa), konsumsi (pengeluaran rumah tangga untuk barang dan jasa), investasi (pengeluaran untuk barang modal yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan), dan pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa.³⁴

PDB berfungsi sebagai indikator utama untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi PDB suatu negara, semakin besar pula kapasitas ekonomi dan potensi kesejahteraan masyarakat³⁵. Sebaliknya, penurunan PDB dapat menunjukkan resesi atau kontraksi ekonomi, yang dapat berdampak negatif pada lapangan kerja dan pendapatan masyarakat.³⁶ PDB juga digunakan untuk menganalisis tren ekonomi dari waktu ke waktu dan membandingkan kinerja ekonomi antar negara.³⁷

Meskipun PDB mencerminkan kapasitas ekonomi suatu daerah, banyak kritik yang juga muncul karena PDB tidak memperhitungkan distribusi pendapatan maupun kualitas hidup masyarakat.³⁸ Pada kajian Chancel & Piketty, 2021 disebutkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi global telah meningkat dalam beberapa dekade terakhir, distribusi manfaat dari pertumbuhan tersebut tidak

(Semarang: “Economica: Jurnal Ekonomi Islam, 2017), 270. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1442>”

³³ Nasution, Silalahi, dan Khairunnisa, “Analisis Pengaruh GDP, Inflasi, CAR dan NPF terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia” (Yogyakarta: “Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam”, 2022), 3284. “<https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6352>”

³⁴ Meyliana & Mulazid, “Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB), Jumlah Bagi Hasil, dan Jumlah Kantor terhadap Jumlah Deposito Muḍārabah Bank Syariah di Indonesia Periode 2011–2015”, 270. “<https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1442>”

³⁵ Meyliana & Mulazid, “Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB), Jumlah Bagi Hasil, dan Jumlah Kantor terhadap Jumlah Deposito Muḍārabah Bank Syariah di Indonesia Periode 2011–2015” 271. “<https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1442>”

³⁶ Nasution, Silalahi, dan Khairunnisa, “Analisis Pengaruh GDP, Inflasi, CAR dan NPF terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia”, 3285. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6352>

³⁷ Meyliana & Mulazid, “Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB), Jumlah Bagi Hasil, dan Jumlah Kantor terhadap Jumlah Deposito Muḍārabah Bank Syariah di Indonesia Periode 2011 - 2015”, 271. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1442>

³⁸ Andrea Indaco, *From Twitter to GDP: Estimating Economic Activity from Social Media* (Regional Science and Urban Economics, 2020), 103591. <https://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2020.103591>

merata³⁹. Temuan ini mengkritik teori Kuznet, yang optimis terhadap penurunan ketimpangan di suatu waktu seiring pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kesejahteraan ekonomi, PDB sebaiknya dikaji bersamaan dengan indikator lain seperti Rasio Gini dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)⁴⁰.

Pertumbuhan PDB dapat meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat. Namun, jika pertumbuhan ini tidak didistribusikan secara merata di antara kelompok sosial ekonomi, kesenjangan kemungkinan akan meningkat.⁴¹ PDB suatu negara adalah ukuran total produksi barang dan jasanya, sedangkan ukuran total produksi barang dan jasa disebut dengan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Berikut merupakan data PDRB untuk semua provinsi di Indonesia:

Tabel 1.3 data PDRB atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran (juta rupiah) sumber: bps

No	Provinsi (PDRB)	[SERI 2010] 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah) 2024				
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Tahunan
1	Aceh	57,522,923	59,336,230	60,982,489	65,360,452	243,202,094
2	Sumatera Utara	273,486,899	285,317,151	292,397,542	295,718,162	1,146,919,755
3	Sumatera Barat	80,705,884	83,285,887	83,515,886	85,428,785	332,936,442
4	Riau	264,293,253	274,174,117	284,767,602	289,246,643	1,112,481,615
5	Jambi	74,544,573	81,090,415	82,978,404	84,362,136	322,975,528
6	Sumatera Selatan	157,419,883	165,962,058	171,657,588	168,922,193	663,961,722

³⁹ Chancel & Piketty, "Global Income Inequality, 1820–2020: The Persistence and Mutation of Extreme Inequality", 2–3. <https://shs.hal.science/halshs-03321887v1>

⁴⁰ Chang, Ni, Boediono, P. dan Widianingsih, L. P., *Determinan makroekonomi dan pajak daerah terhadap ketimpangan ekonomi: Pengaruh UMR, IPM, pekerjaan formal, populasi, dan pajak daerah terhadap ketimpangan ekonomi* (Jakarta: Media Akuntansi dan Perpajakan Indonesia, 2025), 6(2)

⁴¹ Evanty Caesarisma, *Analisis Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Jawa Barat 2017-2021*, (Bandung: Jurnal Ekonomika dan Dinamika Sosial, 2023).

No	Provinsi (PDRB)	[SERI 2010] 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah) 2024				
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan II	Triwulan IV	Tahunan
7	Bengkulu	24,669,153	26,501,147	25,828,683	26,992,939	103,991,921
8	Lampung	112,092,923	124,669,441	125,571,781	121,548,776	483,882,921
9	Kep. Bangka Belitung	25,192,554	27,106,554	27,052,265	28,153,444	107,504,817
10	Kep. Riau	85,528,151	86,694,894	86,767,234	93,446,150	352,436,429
11	DKI Jakarta	896,036,516	915,860,515	920,334,641	947,126,925	3,679,358,597
12	Jawa Barat	683,638,345	706,530,383	708,477,981	724,692,023	2,823,338,732
13	Jawa Tengah	444,852,170	453,302,346	458,735,086	460,887,355	1,817,776,957
14	DI Yogyakarta	47,577,086	48,075,346	48,114,991	49,747,137	193,514,560
15	Jawa Timur	764,298,991	793,024,121	808,526,585	802,445,886	3,168,295,584
16	Banten	211,720,547	217,089,512	219,879,615	224,936,578	873,626,252
17	Bali	69,614,014	74,756,269	75,715,080	78,356,147	298,441,510
18	Nusa Tenggara Barat	43,659,456	46,796,898	46,969,567	44,839,273	182,265,194
19	Nusa Tenggara Timur	32,127,763	34,777,674	34,448,222	35,928,818	137,282,476
20	Kalimantan Barat	71,718,060	73,845,024	75,814,033	78,789,771	300,166,888
21	Kalimantan Tengah	52,259,766	54,545,700	55,375,550	60,683,486	222,864,502
22	Kalimantan Selatan	65,213,443	71,696,614	74,776,322	75,132,489	286,818,867
23	Kalimantan Timur	208,097,465	214,583,268	214,172,681	221,577,326	858,430,740
24	Kalimantan Utara	35,286,351	36,264,727	37,088,860	38,153,545	146,793,483

No	Provinsi (PDRB)	[SERI 2010] 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah) 2024				
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Tahunan
		25	Sulawesi Utara	43,349,555	46,262,107	47,174,332
26	Sulawesi Tengah	86,932,697	95,461,396	95,555,457	99,000,775	376,950,324
27	Sulawesi Selatan	161,074,853	175,986,665	181,787,565	177,403,682	696,252,765
28	Sulawesi Tenggara	44,494,781	46,218,136	47,937,726	50,831,105	189,481,748
29	Gorontalo	13,124,627	13,550,792	13,861,155	14,017,930	54,554,504
30	Sulawesi Barat	14,869,161	16,250,037	16,197,372	16,898,312	64,214,882
31	Maluku	14,888,158	15,469,458	15,953,733	16,334,891	62,646,241
32	Maluku Utara	21,097,868	23,578,496	22,513,124	28,598,184	95,787,672
33	Papua Barat	15,877,076	20,181,370	20,234,179	19,884,861	76,177,485
34	Papua Barat Daya	8,966,718	9,222,553	9,326,706	9,524,366	37,040,343
35	Papua	20,803,902	21,435,142	21,500,837	22,174,453	85,914,334
36	Papua Selatan	8,071,756	8,270,191	8,353,955	8,686,944	33,382,846
37	Papua Tengah	42,822,004	43,652,771	43,899,583	44,568,597	174,942,955
38	Papua Pegunungan	6,359,673	6,642,682	6,655,538	6,903,533	26,561,427
Total		5,284,288,998	5,497,468,087	5,570,899,950	5,667,892,366	22,020,549,402

Kebijakan ekonomi yang tidak inklusif juga merupakan faktor yang dapat menyebabkan ketimpangan. Kebijakan ekonomi yang tidak mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang lebih miskin dapat memperburuk ketimpangan. Kebijakan Upah Minimum Regional (UMR) misalnya, jika dapat menguatkan daya

beli masyarakat maka ekonomi akan bergerak, sehingga dapat mengurangi tingkat ketimpangan. UMR adalah upah terendah yang secara legal harus dibayar kepada pekerja di suatu wilayah. UMR merupakan kebijakan protektif untuk meningkatkan daya beli dan mengurangi kemiskinan. Sebagai instrumen langsung dari pemerintah, kebijakan ini berperan penting dalam menjaga kesejahteraan pekerja formal sehingga meningkatkan daya beli masyarakat dan mempersempit jurang ekonomi antara pekerja formal dan informal.⁴²

Namun demikian, UMR sering menimbulkan kontroversi, terutama terkait dampaknya terhadap pengangguran dan ketimpangan pendapatan. Beberapa pihak mengkritik bahwa penetapan UMR dapat meningkatkan biaya produksi bagi perusahaan, yang pada akhirnya berpotensi menekan lapangan kerja. Meskipun begitu, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa UMR dapat menjadi alat efektif dalam mengurangi ketimpangan.⁴³ Sebagai contoh, sebuah studi di Spanyol menemukan bahwa efektivitas UMR terhadap efisiensi dan pemerataan pendapatan sangat tergantung pada bentuk negosiasinya, apakah bersifat publik atau privat.⁴⁴

Di Indonesia, UMR memiliki peran strategis dalam menentukan standar hidup pekerja formal. Beberapa studi menunjukkan bahwa meskipun UMR belum memiliki dampak langsung yang signifikan terhadap rasio Gini⁴⁵, tetapi jika diterapkan secara tepat dan konsisten, upah minimum dapat membantu meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Peningkatan UMR dapat memperbaiki taraf hidup pekerja tetap, meskipun mungkin belum cukup efektif dalam mengurangi kesenjangan antara pekerja tetap dan pekerja tidak tetap.⁴⁶ Penelitian telah menemukan bahwa UMR memiliki dampak negatif terhadap ketimpangan pendapatan khusus pada pekerja tetap. Artinya,

⁴² Chang, Boediono, & Widianingsih, *Determinasi Makroekonomi dan Pajak Daerah*, 6(2).

⁴³ Chang, Boediono, & Widianingsih, *Determinasi Makroekonomi dan Pajak Daerah*, 6(2).

⁴⁴ Luis Ezquerro, José Gómez-Miñambres, Nuria Jimenez, & Pavel Kujal, “*The Effect of Wage Proposals on Efficiency and Income Distribution*”, (Amsterdam: “Journal of Economic Behavior and Organization”, 2023), 216, 470–475. “<https://doi.org/10.1016/j.jebo.2023.10.006>”

⁴⁵ Nurfadila, *Identifikasi Faktor-Faktor Pengaruh Indeks Gini Ratio Menggunakan Regresi Logistik Ordinal*, (Unpublished manuscript).

⁴⁶ Diana Wijayanti dan Ismayana Dwi Nanda Putri, *Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa Tahun 2017–2022*, (Jawa: Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan, 2023), 126-134.

peningkatan UMR akan menurunkan indeks Gini.⁴⁷ Berikut adalah data UMR pada tahun 2024 di setiap provinsi di Indonesia:

Tabel 1.4 data UMR setiap provinsi Indonesia (juta rupiah), Sumber: BPS, Kemnaker RI

No	Provinsi	UMR 2024 (Rp)
1	Aceh	3,460,672.00
2	Sumatera Utara	2,809,915.00
3	Sumatera Barat	2,811,449.27
4	Riau	3,294,625.56
5	Jambi	3,037,121.85
6	Sumatera Selatan	3,456,874.00
7	Bengkulu	2,507,079.24
8	Lampung	2,716,497.00
9	Kep. Bangka Belitung	3,640,000.00
10	Kep. Riau	3,402,492.00
11	DKI Jakarta	5,067,381.00
12	Jawa Barat	2,057,495.00
13	Jawa Tengah	2,036,947.00
14	DI Yogyakarta	2,125,897.61
15	Jawa Timur	2,165,244.30
16	Banten	2,727,812.11
17	Bali	2,813,672.00
18	Nusa Tenggara Barat	2,444,067.00
19	Nusa Tenggara Timur	2,186,826.00
20	Kalimantan Barat	2,702,616.00
21	Kalimantan Tengah	3,261,616.00
22	Kalimantan Selatan	3,282,812.21
23	Kalimantan Timur	3,360,858.00
24	Kalimantan Utara	3,361,653.00
25	Sulawesi Utara	3,545,000.00
26	Sulawesi Tengah	2,736,698.00
27	Sulawesi Selatan	3,434,298.00
28	Sulawesi Tenggara	2,885,964.04
29	Gorontalo	3,025,100.00

⁴⁷ Wijayanti dan Putri, *Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa Tahun 2017-2022*, 126-134.

No	Provinsi	UMR 2024 (Rp)
30	Sulawesi Barat	2,914,958.08
31	Maluku	2,949,953.00
32	Maluku Utara	3,200,000.00
33	Papua Barat	3,393,500.00
34	Papua Barat Daya	3,393,500.00
35	Papua	4,024,270.00
36	Papua Selatan	4,024,270.00
37	Papua Tengah	4,024,270.00
38	Papua Pegunungan	4,024,270.00
Rata-rata		3,113,359.85

Selain dua hal di atas, seperti yang disampaikan oleh Celios, ketidaksetaraan terhadap akses pendidikan dan layanan kesehatan juga menjadi penyebab ketimpangan pendapatan⁴⁸. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran komprehensif yang mengukur kemajuan dalam tiga dimensi: pendapatan, pendidikan, dan kesehatan.

IPM menjadi penting karena lebih menggambarkan kualitas hidup secara menyeluruh dibanding PDB.⁴⁹ Selain IPM ada juga Indeks Pembangunan Manusia Islam atau dikenal dengan istilah Islamic Human Development Indeks (IHDI). IHDI merupakan alat ukur yang dirancang untuk menilai kesejahteraan masyarakat dengan memasukkan dimensi spiritual dan religius dalam pengukuran pembangunan manusia. Tujuan IHD adalah untuk memberikan perspektif yang lebih luas tentang kesejahteraan dengan memperhatikan nilai-nilai moral dan etika yang sesuai dengan prinsip Islam selain aspek material.⁵⁰

⁴⁸ Askar, Muhammad, Achmad, dan Imaduddin, “Laporan Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2024: Pesawat Jet untuk Si Kaya, Sepeda untuk Si Miskin”, 7-11. Retrieved from <https://www.celios.co.id>

⁴⁹ Andi D. Prasetyo & U. Zuhdi, “The Government Expenditure Efficiency towards the Human Development”, (Amsterdam: “Procedia Economics and Finance”, 2013), 5, 616. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(13\)00072-5](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(13)00072-5)

⁵⁰ Aris Marfilia, R. A. Ghofur, & G. Nurmalia, *The Influence of Fiscal Capacity, IHDI and UMP on Economic Growth in Java Island in the Perspective of Islamic Economics*, (Yogyakarta: Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2025), 9(1), 145. <https://doi.org/10.30868/ad.v9i0.8112>

Marfilia, A. Et al mengatakan bahwa meskipun IHDI memiliki komponen yang sama dengan IPM, namun IHDI mempertimbangkan aspek-aspek yang lebih luas, seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan pengelolaan kekayaan.⁵¹ Bahkan Anggraeni et al mengatakan bahwa IHDI mengintegrasikan lima komponen utama yang sejalan dengan prinsip-prinsip Maqashid Sharia, yaitu: kesehatan (nafs), pendidikan (aql), kesejahteraan ekonomi (maal), keadilan sosial, serta zakat dan tanggung jawab sosial. Kesehatan (Nafs) diukur melalui angka harapan hidup. Kesehatan dianggap sebagai salah satu aspek fundamental dalam mencapai kesejahteraan individu. Pendidikan (Aql) diukur melalui tingkat literasi dan pengeluaran untuk pendidikan. Pendidikan merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemampuan individu. Kesejahteraan ekonomi (Maal) dapat diukur melalui GDP per kapita dan jumlah pekerja. Kesejahteraan ekonomi mencerminkan kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Adapun Keadilan sosial meskipun tidak selalu diukur secara langsung dalam IHDI, keadilan sosial mencakup prinsip-prinsip distribusi kekayaan yang adil dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Ini termasuk aspek seperti pengurangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Sedangkan zakat dan tanggung jawab sosial berfungsi sebagai instrumen untuk redistribusi kekayaan dan membantu masyarakat yang kurang mampu. Dalam konteks IHDI, zakat mencerminkan tanggung jawab sosial individu dan masyarakat untuk membantu meningkatkan kesejahteraan orang lain.⁵²

Baik IPM ataupun IHDI, keduanya memberi gambaran menyeluruh tentang pembangunan manusia di luar sekadar ekonomi. Ketika IPM meningkat, masyarakat cenderung memiliki lebih banyak peluang ekonomi yang setara.⁵³ IPM sering disalahartikan hanya sebagai ukuran kinerja pembangunan, padahal ia juga

⁵¹ Marfilia, Ghofur, Nurmalia, *The Influence of Fiscal Capacity, IHDI and UMP on Economic Growth in Java Island in the Perspective of Islamic Economics*, 146. <https://doi.org/10.30868/ad.v9i0.8112>

⁵² Anggraini, Santosa, dan Citaningati, *Pengaruh Islamic Human Development Index, Pengangguran, Ketimpangan Pendapatan, dan Upah Minimum Kabupaten Terhadap Kemiskinan (Studi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2009 - 2022)*. 3143-3153. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i3.15079>

⁵³ Chang, Boediono, & Widianingsih, *Determinasi Makroekonomi dan Pajak Daerah*, 6(2).

bersifat transformasional. Artinya, ketika pemerintah secara aktif menginvestasikan anggaran pada peningkatan mutu pendidikan, akses layanan kesehatan, dan penguatan ekonomi lokal, dampaknya bukan hanya peningkatan IPM di atas kertas, tetapi juga redistribusi peluang dan sumber daya, yang secara empiris terbukti menurunkan ketimpangan pendapatan sebagaimana hasil penelitian oleh Anggraini et al.⁵⁴

Beberapa penelitian lain juga menunjukkan bahwa IPM memiliki dampak positif pada indeks rasio gini. Artinya, Indeks Pembangunan Manusia yang lebih tinggi cenderung memiliki rasio gini yang lebih tinggi karena adanya perbedaan akses terhadap sumber daya pembangunan⁵⁵. Semakin tinggi IPM produktivitas tenaga kerja cenderung semakin tinggi pula, sehingga kesenjangan antara kelompok yang memiliki akses baik terhadap fasilitas pembangunan dan kelompok yang tidak memilikinya tidak semakin lebar.⁵⁶ Namun, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa IPM tidak serta-merta berdampak signifikan terhadap pengurangan ketimpangan karena sumber daya manusia yang ada di beberapa daerah belum terdistribusi secara merata⁵⁷. Berikut merupakan data IPM yang diambil dari BPS sejak 2022 sampai 2024, berturut-turut dari angka tertinggi hingga angka terendah pada tahun 2024:

Tabel 1.5 data IPM setiap provinsi Indonesia (%), Sumber: Data diolah dari BPS

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia (%)		
		2022	2023	2024
1	DKI Jakarta	81.65	82.46	83.08
2	DI Yogyakarta	80.64	81.07	81.55
3	Kalimantan Timur	77.44	78.2	78.83
4	Kepulauan Riau	76.46	77.11	77.97

⁵⁴ Chang, Boediono, & Widianingsih, *Determinasi Makroekonomi dan Pajak Daerah*, 6(2).

⁵⁵ Nurfadila, "Identifikasi Faktor-Faktor Pengaruh Indeks Gini Ratio Menggunakan Regresi Logistik Ordinal"

⁵⁶ Agam Firdaus, *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Upah Minimum Kabupaten, Pengangguran, Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan Kab/Kota Di Provinsi Bali Pada Tahun 2015–2022*, (Bali: Primanomics, 2023), (halaman tidak disebutkan)., https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/7720/2/ABSTRAK%20SKRIPSI_TEDY_SYAHPUTRA_200430013%5B1%5D.pdf

⁵⁷ Wijayanti dan Putri, *Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa Tahun 2017-2022*, 126–134.

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia (%)		
		2022	2023	2024
5	Bali	76.44	77.1	77.76
6	Sulawesi Utara	73.81	74.36	75.03
7	Riau	73.52	74.04	74.79
8	Sumatera Barat	73.26	73.75	74.49
9	Banten	73.32	73.87	74.48
10	Jawa Barat	73.12	73.74	74.43
11	Jawa Timur	72.75	73.38	74.09
12	Sulawesi Selatan	72.82	73.46	74.05
13	Aceh	72.8	73.4	74.03
14	Sumatera Utara	72.71	73.37	74.02
15	Jawa Tengah	72.79	73.39	73.88
16	Sulawesi Tenggara	72.23	72.79	73.48
17	Jambi	72.14	72.77	73.43
18	Bengkulu	72.16	72.78	73.39
19	Kep. Bangka Belitung	72.24	72.85	73.33
20	Kalimantan Selatan	71.84	72.5	73.03
21	Kalimantan Utara	71.83	72.49	73.02
22	Papua	61.39	62.25	73
23	Kalimantan Tengah	71.63	72.2	72.73
24	Sumatera Selatan	70.9	71.62	72.3
25	Lampung	70.45	71.15	71.81
26	Maluku	70.22	70.94	71.57
27	Sulawesi Tengah	70.28	70.95	71.56
28	Gorontalo	69.81	70.45	71.23
29	Maluku Utara	69.47	70.21	71.03
30	Nusa Tenggara Barat	69.46	70.2	70.93
31	Kalimantan Barat	68.63	69.41	70.13
32	Papua Barat Daya	-	-	68.63
33	Sulawesi Barat	66.92	67.55	68.2
34	Papua Selatan	-	-	67.9
35	Nusa Tenggara Timur	65.9	66.68	67.39
36	Papua Barat	65.89	66.66	67.02
37	Papua Tengah	-	-	59.75
38	Papua Pegunungan	-	-	53.42

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia (%)		
		2022	2023	2024
	Indonesia	72.91	73.55	74.2

Ketika terjadi pertumbuhan ekonomi dengan indikasi adanya peningkatan PDRB/PDB disertai investasi dalam pengembangan manusia melalui kebijakan upah minimum lokal yang adil dan program pendidikan kesehatan yang tercermin dalam nilai IPM, diharapkan membantu dalam mengurangi ketimpangan. Peningkatan upah minimum daerah harus disertai dengan penguatan sumber daya manusia sehingga masyarakat dapat mengisi pekerjaan berkualitas yang tercipta dari pertumbuhan ekonomi.

Dari pemaparan data yang disampaikan dari UMR, PDRB, dan Rasio Gini dari setiap provinsi di Indonesia pada tahun 2024, berikut kombinasi datanya:

Tabel 1.6 *Cross* data dari UMR, PDRB, IPM setiap provinsi Indonesia,

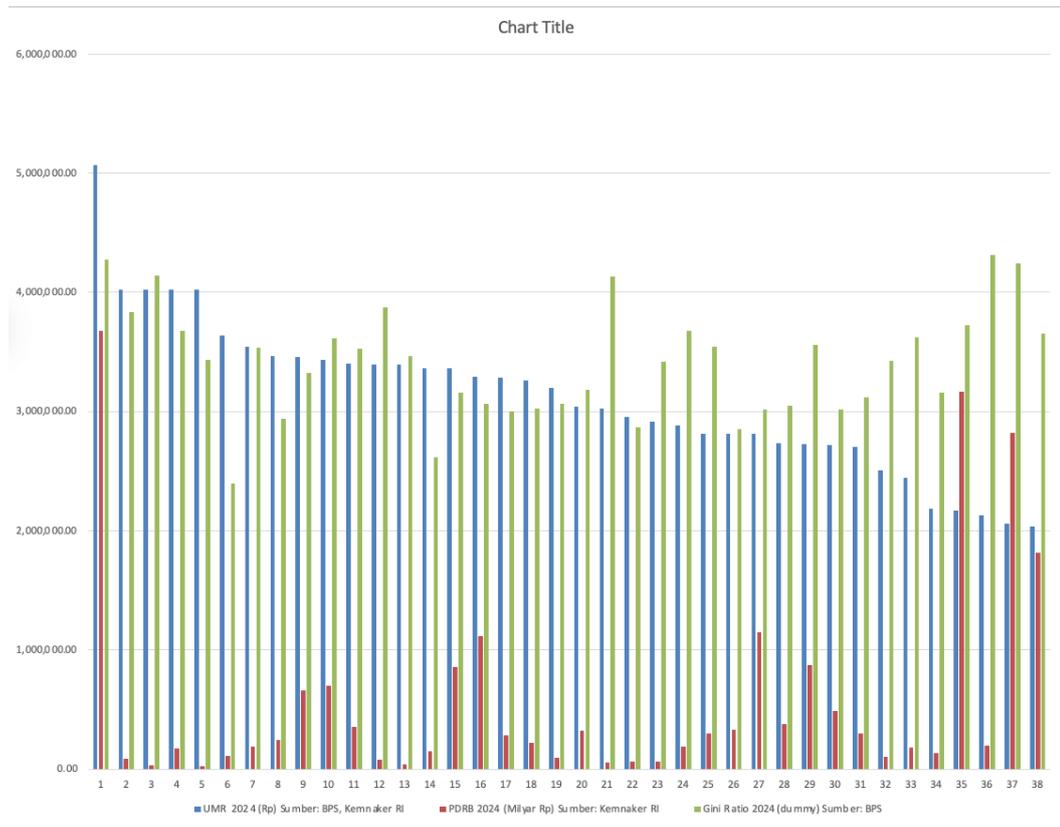
Sumber: BPS dan Kemnaker RI

No.	Provinsi	UMR 2024 (Rp)	PDRB 2024 (Miliar Rp)	Gini Ratio 2024
		<i>Sumber: BPS, Kemnaker RI</i>	<i>Sumber: Kemnaker RI</i>	<i>Sumber: BPS</i>
1	DKI Jakarta	5,067,381.00	3679358.6	0.427
2	Papua	4,024,270.00	85914.33	0.3835
3	Papua Selatan	4,024,270.00	33382.85	0.414
4	Papua Tengah	4,024,270.00	174942.95	0.368
5	Papua Pegunungan	4,024,270.00	26561.43	0.343
6	Kep. Bangka Belitung	3,640,000.00	107504.82	0.2395
7	Sulawesi Utara	3,545,000.00	187374.29	0.3535
8	Aceh	3,460,672.00	243202.09	0.294
9	Sumatera Selatan	3,456,874.00	663961.72	0.332
10	Sulawesi Selatan	3,434,298.00	696252.76	0.3615
11	Kep. Riau	3,402,492.00	352436.43	0.353
12	Papua Barat	3,393,500.00	76177.48	0.387
13	Papua Barat Daya	3,393,500.00	37040.34	0.3465
14	Kalimantan Utara	3,361,653.00	146793.48	0.2615
15	Kalimantan Timur	3,360,858.00	858430.74	0.3155

No.	Provinsi	UMR 2024 (Rp)	PDRB 2024 (Miliar Rp)	Gini Ratio 2024
16	Riau	3,294,625.56	1112481.62	0.3065
17	Kalimantan Selatan	3,282,812.21	286818.87	0.3
18	Kalimantan Tengah	3,261,616.00	222864.5	0.3025
19	Maluku Utara	3,200,000.00	95787.67	0.306
20	Jambi	3,037,121.85	322975.53	0.318
21	Gorontalo	3,025,100.00	54554.5	0.4135
22	Maluku	2,949,953.00	62646.24	0.2865
23	Sulawesi Barat	2,914,958.08	64214.88	0.342
24	Sulawesi Tenggara	2,885,964.04	189481.75	0.3675
25	Bali	2,813,672.00	298441.51	0.3545
26	Sumatera Barat	2,811,449.27	332936.44	0.285
27	Sumatera Utara	2,809,915.00	1146919.76	0.3015
28	Sulawesi Tengah	2,736,698.00	376950.32	0.305
29	Banten	2,727,812.11	873626.25	0.356
30	Lampung	2,716,497.00	483882.92	0.3015
31	Kalimantan Barat	2,702,616.00	300166.89	0.312
32	Bengkulu	2,507,079.24	103991.92	0.3425
33	Nusa Tenggara Barat	2,444,067.00	182265.19	0.3625
34	Nusa Tenggara Timur	2,186,826.00	137282.48	0.316
35	Jawa Timur	2,165,244.30	3168295.58	0.3725
36	DI Yogyakarta	2,125,897.61	193514.56	0.4315
37	Jawa Barat	2,057,495.00	2823338.73	0.4245
38	Jawa Tengah	2,036,947.00	1817776.96	0.3655

Dari data statistik di atas dapat dilihat fenomena yang untuk dibahas. Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024 memiliki angka UMR yang paling tinggi di seluruh provinsi di Indonesia sebesar Rp. 5,067,381. Begitu juga dengan PDRBnya berada pada posisi pertama di angka Rp. 3.679.358.600.000.000. Dan Indeks Pembangunan Manusia juga tinggi berada di peringkat satu juga dengan angka 83,08. Meskipun provinsi DKI Jakarta berada di posisi teratas dalam UMR, PDRB, dan IPM, akan tetapi rasio gini provinsi ini berada di peringkat dua terbesar di Indonesia, yaitu di angka 0,427 setelah DI Yogyakarta. Jika dimunculkan dalam

grafik dengan mengalikan angka rasio gini dengan jumlah tertentu agar terlihat di grafik, maka akan terlihat seperti ini:



Gambar 1.2 grafik posisi rasio gini, PDRB, dan UMR provinsi di Indonesia

Sumber: diolah Peneliti dari data BPS dan Kemnaker RI

Angka satu yang menunjukkan provinsi DKI Jakarta berada pada posisi tertinggi pada UMR yang ditunjukkan oleh warna biru dan pada PDRB yang ditunjukkan oleh warna merah. Sedangkan untuk rasio gini provinsi ini yang ditunjukkan oleh warna hijau berada di peringkat dua terbesar di Indonesia.

Maka dari fenomena ini menjadi suatu permasalahan yang dapat dilakukan penelitian. Fenomena ini tidak menunjukkan teori Kurva Kuznets dalam (Siti Nurul, 2020)⁵⁸ mengenai ketimpangan pendapatan yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Dimana pada tahap awal pembangunan ketimpangan pendapatan cenderung memburuk, tetapi setelah tingkat pendapatan tertentu tercapai ketimpangan akan menurun. Banyak para peneliti yang mengkritik teori

⁵⁸ <https://repositori.untidar.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=30466&bid=12444>

Kuznet karena tidak selalu sesuai dengan data yang ada di lapangan khususnya pada negara berkembang.

Begitu juga dengan pengaruh UMR dan IPM terhadap rasio gini pada fenomena provinsi DKI Jakarta 2024 ini. Padahal sebuah studi seperti dari Miliki et al. (2023) menunjukkan bahwa menaikkan upah minimum dapat mengurangi kesenjangan pendapatan antara pekerja dan orang kaya.⁵⁹ Miliki et al. pada (2023) juga menemukan bahwa daerah dengan IPM yang lebih tinggi cenderung memiliki ketimpangan pendapatan yang lebih rendah. Hal ini disebabkan oleh distribusi sumber daya yang lebih merata dan meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat.⁶⁰

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan dalam Latar Belakang Masalah tadi, diketahui bahwa rasio gini negara Indonesia secara umum pada tahun 2024 berada pada angka 0,3655. Pada kondisi ini Indonesia masih berupaya mengoptimalkan upayanya untuk menurunkan rasio gini yang tidak terlalu tinggi ini.

Meskipun demikian rasio gini pada tingkat provinsi sangat variatif. Provinsi DKI Jakarta berada pada posisi tertinggi kedua dalam rasio gini. Provinsi ini memiliki rasio gini yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan sejumlah provinsi lainnya di Indonesia. Hal ini menjadi indikasi tingkat kesenjangan pendapatan yang sangat besar di provinsi tersebut. Sementara angka PDRB, IPM, dan UMRnya berada pada posisi teratas dari seluruh provinsi di Indonesia. Rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam beberapa pertanyaan berdasarkan pokok masalah yang diteliti yaitu:

⁵⁹ Anggia Sekar Putri dan Seftia Anggraini, *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kota Tanjungpinang*, (Tanjungpinang: Jurnal Manajerial Dan Bisnis, 2024), (halaman tidak disebutkan).

⁶⁰ Haidar Akhmad Al Barabasi, *Analisis Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia Periode 2017–2023 (Studi Kasus 34 Provinsi Di Indonesia)*, (Jakarta: Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen, 2025), (halaman tidak disebutkan).

1. Apakah terdapat pengaruh PDRB terhadap Rasio Gini di provinsi DKI Jakarta tahun 2018-2022?
2. Apakah terdapat pengaruh IPM terhadap Rasio Gini di provinsi DKI Jakarta tahun 2018-2022?
3. Apakah terdapat pengaruh UMR terhadap Rasio Gini di provinsi DKI Jakarta tahun 2018-2022?
4. Apakah terdapat pengaruh simultan dari PDRB, IPM, dan UMR terhadap Rasio Gini di provinsi DKI Jakarta tahun 2018-2022?

Setelah menelaah perbedaan fenomena rasio gini DKI Jakarta 2024 dengan teori ekonomi Kuznets, teori *trickle-down effect* dan beberapa hasil penelitian yang dilakukan semisal oleh Miliki et al. (2023) mengenai pengaruh UMR dan IPM terhadap Rasio Gini, maka perlu dibuktikan kebenaran sesungguhnya.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian di atas, penelitian ini bermaksud untuk menjawab Rumusan Masalah yang dirinci dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian di atas. Penelitian ini diharapkan dapat:

1. Menganalisis pengaruh PDRB provinsi DKI Jakarta terhadap rasio gini di provinsi DKI Jakarta tahun 2018-2022.
2. Menganalisis pengaruh IPM provinsi DKI Jakarta terhadap rasio gini di provinsi DKI Jakarta tahun 2018-2022.
3. Menganalisis pengaruh UMR provinsi DKI Jakarta terhadap rasio gini di provinsi DKI Jakarta tahun 2018-2022.
4. Menganalisis pengaruh PDRB, IPM, dan UMR provinsi DKI Jakarta secara bersama-sama terhadap rasio gini di provinsi DKI Jakarta tahun 2018-2022.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Ada dua kategori manfaat dari hasil penelitian ini yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis. Hasil penelitian dapat memberikan manfaat baik di segi teoritis maupun praktik. Berdasarkan hal tersebut, maka manfaat teoritis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan ekonomi islam yang berkaitan dengan PDRB, IPM, dan UMR, terhadap ketimpangan pendapatan di wilayah urban.
2. Sebagai salah satu sumber pembelajaran mata kuliah ekonomi makro dan ekonomi pembangunan khususnya materi ketimpangan pendapatan di wilayah urban.
3. Sebagai sumbangan referensi penelitian bagi para peneliti selanjutnya yang tertarik dengan topik ketimpangan pendapatan di wilayah urban.

Sementara manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber pembelajaran pada materi tentang ketimpangan khususnya di wilayah urban sehingga setiap mahasiswa mempunyai kemampuan menganalisis lebih dalam bagaimana pengaruh PDRB, IPM, dan UMR, terhadap ketimpangan.
2. Bagi pemerintah pusat secara umum, dan provinsi yang diteliti secara khusus, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai masukan dalam proses penyusunan kebijakan mengenai penurunan angka ketimpangan di provinsinya.
3. Bagi masyarakat umum, sebagai bahan rekomendasi dalam proses partisipasi dalam pembangunan ekonomi, khususnya dalam menyelesaikan masalah ketimpangan.

Masih banyak hal-hal yang belum tersentuh oleh penelitian ini sebenarnya. Hal-hal tersebut menjadi kekurangan dari penelitian ini, sehingga diperlukan penelitian lanjutan.

E. Kerangka Berpikir

1. Pengaruh Pendapatan Domestik Bruto (PDB) terhadap Rasio Gini

Pengaruh PDB sebagai indikator pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan telah menjadi topik perdebatan yang lama. Menurut pendekatan klasik, ketimpangan terjadi karena perbedaan produktivitas individu. Artinya ketimpangan merupakan konsekuensi yang normal terjadi seiring dengan berjalannya struktur pasar tanpa harus dilakukan intervensi. Namun, pendekatan modern menyatakan bahwa institusi, kebijakan pemerintah, dan struktur pasar juga

berperan besar dalam naik turunnya ketimpangan.⁶¹ Dalam pendekatan modern, pertumbuhan PDB tidak otomatis menurunkan ketimpangan. Jika pertumbuhan tidak diimbangi dengan kebijakan distribusi yang adil, ketimpangan justru bisa meningkat.⁶² Pendapat ini sama dengan konsep keadilan substantif dalam ekonomi Islam.

Ada beberapa teori terkait pengaruh PDB terhadap Rasio Gini. Teori (Kuznets) merupakan teori yang sangat terkenal dalam hal ini. PDB sering kali meningkat bersamaan dengan ketimpangan pendapatan dalam tahap awal pembangunan, tetapi dapat menurun jika disertai redistribusi. Namun, Piketty dan Chancel menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu berarti pemerataan. Pertumbuhan PDB bisa memperbesar ketimpangan bila keuntungan hanya dinikmati oleh kelompok elite⁶³. Masalah ini akan segera dibahas dalam teori-teori mengenai pengaruh PDB terhadap Rasio Gini.

a. Teori Kurva Kuznets

Simon Kuznets berpendapat bahwa ketimpangan pendapatan mengikuti pola *inverted-U* yaitu meningkat pada tahap awal pembangunan ekonomi, lalu menurun saat industrialisasi dan redistribusi mulai efektif.⁶⁴ Dalam teorinya Kuznets menjelaskan bahwa Pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, perubahan struktural seperti industrialisasi dan urbanisasi menyebabkan ketimpangan pendapatan meningkat. Namun, seiring dengan kematangan ekonomi, ketimpangan pendapatan akan menurun setelah mencapai tingkat pendapatan tertentu. Kuznets berargumen bahwa kelompok berpenghasilan tinggi akan berkontribusi besar terhadap modal dan tabungan, sementara kelompok berpenghasilan rendah memiliki kemampuan menabung yang terbatas. Hal ini menyebabkan konsentrasi

⁶¹ Lorenzo Ezquerra, José Gómez-Miñambres, Nuria Jimenez, & Pavel Kujal, “*The Effect of Wage Proposals on Efficiency and Income Distribution*”, (Amsterdam: “Journal of Economic Behavior and Organization”, 2023), 476. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2023.10.006>”

⁶² Dušan Lazović Vuković & Jože P. Damijan, *Drivers of Income Inequality in OECD Countries: Testing the Milanovic’s TOP Hypothesis*, (Oxford: Structural Change and Economic Dynamics, 2025), 419. <https://doi.org/10.1016/j.strueco.2025.04.004>

⁶³ Chancel & Piketty, *Global Income Inequality, 1820–2020: The Persistence and Mutation of Extreme Inequality*, 2–3. <https://shs.hal.science/halshs-03321887v1>

⁶⁴ Lazović, Vuković & Damijan, *Drivers of Income Inequality in OECD countries: Testing the Milanovic’s TOP hypothesis. Structural Change and Economic Dynamics*, 417. <https://doi.org/10.1016/j.strueco.2025.04.004>

pendapatan di kelompok kaya, yang pada gilirannya memperlebar kesenjangan pendapatan. Beberapa penelitian telah mendukung hipotesis ini⁶⁵. Diantara mereka Anggia (2024), menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap Rasio Gini.

Teori ini menyatakan peningkatan ketimpangan di fase awal pertumbuhan ekonomi merupakan keniscayaan, namun ia akan menurun pada fase lanjut. Artinya ketimpangan yang terjadi pada saat pertumbuhan ekonomi merupakan satu bentuk konsekuensi yang normal, sampai terjadinya stabilitas ekonomi dan redistribusi pendapatan. Namun, banyak negara berkembang menunjukkan peningkatan ketimpangan bersamaan dengan pertumbuhan PDB⁶⁶. Ketika pertumbuhan PDB menjadi tujuan utama dari perekonomian maka ketimpangan tidak akan dapat dihindari. Hal ini menunjukkan bahwa untuk menekan ketimpangan diperlukan kualitas pertumbuhan bukan besarnya kuantitas pertumbuhan semata. Pertumbuhan yang dirasakan oleh semua pihak merupakan pertumbuhan yang berkualitas.

Pertumbuhan ekonomi di negara-negara dengan sistem ekonomi kapitalis diukur dengan indikator pendapatan, Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Nasional Bruto (GNP). Oleh karena itu, PDB adalah indikator penting untuk mengukur kemajuan ekonomi suatu negara. Negara-negara dengan pendapatan atau pendapatan per kapita yang tinggi umumnya dianggap sebagai negara maju, yang menunjukkan tingkat kemakmuran ekonomi yang baik. Para pembuat kebijakan sering kali menekankan pentingnya pertumbuhan pendapatan per kapita sebagai ukuran keberhasilan ekonomi, dan negara-negara yang berhasil meningkatkan pendapatan mereka secara signifikan sering dipuji atas kinerja ekonomi mereka. Oleh karena itu, untuk menilai kesejahteraan ekonomi nasional dan individu, tingkat pendapatan sangat penting dalam ekonomi Barat.⁶⁷ Maka teori Kuznet sangat cocok dengan perekonomian kapitalis yang mendahulukan pertumbuhan

⁶⁵ Yozi Vionita dan Dwirani Puspa Artha, *Analisis Faktor-Faktor Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa* (–: Media Riset Ekonomi Pembangunan (Medrep), 2024), –.

⁶⁶ Indaco, Alberto, *From Twitter to GDP: Estimating economic activity from social media* (–: Regional Science and Urban Economics, 2020), 1, 103591. <https://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2020.103591>

⁶⁷ Aaron K. Dutt & Christopher K. Wilber, *Production, Income, and Economic Growth*, (London: Palgrave Macmillan, 2010), 158–174.

ekonomi yang menjadikan ketimpangan hanya sebagai salah satu konsekuensi struktur pasar. Ini juga sejalan dengan konsep keadilan prosedural yang dikemukakan oleh Friedrich Hayek, tokoh utama dalam pemikiran neoliberal, yang mengatakan keadilan prosedural tercermin dalam keyakinan bahwa selama aturan pasar diterapkan secara adil dan setara bagi semua pelaku ekonomi maka sudah dianggap adil. Keadilan prosedural adalah bentuk keadilan yang menekankan keadilan proses daripada hasil akhir. Friedrich Hayek percaya bahwa jika aturan main pasar dijalankan secara adil tanpa campur tangan pihak manapun, maka hasilnya dapat dianggap adil, meskipun menghasilkan ketimpangan.⁶⁸

Pemikiran dalam sistem ekonom Barat ini mendapat kritik dari banyak pihak. Penggunaan PDB sebagai ukuran pertumbuhan ekonomi tidak cukup mencerminkan kesejahteraan atau standar hidup. Karena pendapatan yang menjadi indikator kegiatan ekonomi gagal memperhitungkan kesejahteraan secara keseluruhan.⁶⁹

b. Teori *trickle-down effect*

Pertumbuhan ekonomi diasumsikan dapat mengurangi ketimpangan melalui efek *trickle-down* dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Teori ini menyatakan bahwa “Ketika kebijakan ekonomi berfokus pada pertumbuhan dan keuntungan di kelompok kaya atau kelas atas, maka pada akhirnya manfaat dari pertumbuhan itu akan ‘menetes ke bawah’ ke kelompok miskin dalam bentuk lapangan kerja, investasi, dan distribusi pendapatan.”⁷⁰. Menurut model Aghion dan Bolton, amplifikasi modal yang tinggi pada awalnya dapat meningkatkan pendapatan ketidaksetaraan, tetapi pada akhirnya dapat mempengaruhi distribusi kekayaan yang lebih akurat, yang setara dengan kurva Kuznets. Intervensi pemerintah, seperti redistribusi kekayaan, dapat meningkatkan efisiensi produksi dan memperlambat proses *trickle-down* sekaligus mempromosikan kesetaraan

⁶⁸ Friedrich A. Hayek, *Law, Legislation and Liberty: Vol. 2: The Mirage of Social Justice*, (Chicago: University of Chicago Press, 1976), — (halaman tidak disebutkan).

⁶⁹ Brian G. Field, GDP Revisited (England: Journal of Mega Infrastructure & Sustainable Development, 2022), 2, 310–313, doi.org/10.1080/24724718.2021.2087962

⁷⁰ N. Gregory Mankiw dan Mark P. Taylor, *Economics* (United Kingdom: Cengage Learning EMEA, 2000), 497, Paul A. Samuelson & William D. Nordhaus, *Economics* (New York: McGraw-Hill, 2010), 501

kesempatan.⁷¹ Namun, teori ini juga dikritik beberapa dekade terakhir karena manfaat pertumbuhan sering tidak mengalir merata seperti yang dikatakan. Jika pertumbuhan tidak inklusif, maka kelompok kaya akan lebih cepat menikmati manfaatnya, yang memperlebar ketimpangan⁷².

c. Teori Piketty

Setelah teori Simon Kuznets menyebar mengenai ketimpangan pendapatan, muncul penelitian yang dilakukan oleh Chancel dan Piketty. Hal menarik yang mereka temukan bahwa ketimpangan tetap tinggi meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi. Dalam artikelnya Piketty dan Chancel menyebutkan mengenai ketimpangan global yang meningkat pesat selama abad ke-19 karena kolonialisme dan dominasi Barat. Setelah 1910, ketimpangan stabil di tingkat tinggi. Namun pada periode 1980–2020, ketimpangan dalam negara meningkat, sementara ketimpangan antarnegara menurun⁷³. Mereka juga mengatakan bahwa sistem kapitalisme abad ke-21 menghasilkan ketimpangan ekstrem serupa dengan era kolonial. Fenomena ini menunjukkan adanya struktur ekonomi global yang memungkinkan akumulasi kekayaan secara tidak proporsional. Artinya dunia mengalami bentuk kapitalisme baru yang tetap menghasilkan ketimpangan ekstrem, meskipun dengan institusi yang berbeda dari era kolonial.⁷⁴

Sebagai antitesis hipotesis Kurva Kuznet, teori yang dikemukakan oleh Thomas Piketty telah menolak asumsi Kuznets. Ia menunjukkan bahwa dalam sistem kapitalisme, ketimpangan akan terus meningkat selama tingkat pengembalian modal (r) lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi (g), kecuali terdapat intervensi kebijakan progresif⁷⁵. Teori ini dirumuskan dengan: **ketimpangan = $r > g$** . Dari sini Piketty menyarankan reformasi sistem global, termasuk redistribusi pendapatan internasional melalui pajak global, untuk

⁷¹ “Prabhat Aghion & Patrick Bolton, *A Theory of Trickle-Down Growth and Development*”, (Oxford: “The Review of Economic Studies”, 1997), 151–172. <https://doi.org/10.2307/2971707>

⁷² Samuelson & Nordhaus, *Economics*, 323

⁷³ Chancel & Piketty, *Global income inequality, 1820–2020: The persistence and mutation of extreme inequality*. 2–3 <https://shs.hal.science/halshs-03321887v1>

⁷⁴ Chancel & Piketty, *Global income inequality, 1820–2020: The persistence and mutation of extreme inequality*. 2 <https://shs.hal.science/halshs-03321887v1>

⁷⁵ Chancel & Piketty, *Global income inequality, 1820–2020: The persistence and mutation of extreme inequality*. 2 <https://shs.hal.science/halshs-03321887v1>

menurunkan ketimpangan jangka panjang⁷⁶. Penelitian lain mendukung teori ini dan menyatakan bahwa PDB yang tinggi belum tentu menurunkan ketimpangan pendapatan apabila pertumbuhan tersebut tidak bersifat inklusif.⁷⁷ Di Indonesia sendiri banyak para peneliti melakukan penelitian mengenai pengaruh PDRB terhadap Rasio Gini ini. Penelitian dari Yozi V. (2024), Nabila (2023), Evanty (2023), Aprillia (2022), Hasto (2022), Sayifullah (2021), Aufa (2019), Mara (2018), dan Istiqamah (2018) menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap Rasio Gini. Memang ada juga penelitian dari Lestari (2024), Sabilah (2023), dan Ivanovi dkk (2022) yang menunjukkan tidak adanya dari pengaruh signifikan PDRB terhadap Rasio Gini. Tetapi kebanyakan penelitian menunjukkan pengaruh positif yang muncul dari PDRB terhadap Rasio Gini.

Tingginya angka PDRB dapat menjadi indikator pertumbuhan ekonomi khususnya bagi negara-negara yang menganut sistem kapitalis. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara terus-menerus dalam teori Kuznet pada waktunya akan menurunkan rasio gini yang menjadi indikator ketimpangan pendapatan dari suatu daerah. Logika berpikir teoritik mengenai pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang sering menjadi indikator pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, terhadap tingkat ketimpangan pendapatan di daerah tersebut seharusnya memiliki pengaruh negatif. Sehingga ketika PDRB semakin tinggi dalam waktu yang lama maka ketimpangan pendapatan akan menurun. Inilah yang dikemukakan oleh Kuznets. Bahkan ketika sumber PDRB yang tinggi berasal dari kekayaan kelas atas saja, tetap akan menurunkan ketimpangan dengan manfaat dari pertumbuhan yang akan 'menetes ke bawah' ke kelompok miskin dalam bentuk lapangan kerja, investasi, dan distribusi pendapatan sesuai dengan teori *trickle-down effect*. Akan tetapi logika tersebut dibantah oleh teori Piketty dalam penelitiannya yang mengatakan kondisi PDRB yang semakin tinggi dalam waktu panjang akan tetap

⁷⁶ Chancel & Piketty, *Global income inequality, 1820–2020: The persistence and mutation of extreme inequality*. 3 <https://shs.hal.science/halshs-03321887v1>

⁷⁷ Tomás Gregory & Ulrich Zierahn, *When the Minimum Wage Really Bites Hard: The Negative Spillover Effect on High-Skilled Workers*, (Berlin: Journal of Public Economics, 2022), 2. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2021.104582>

meningkatkan ketimpangan selama tingkat pengembalian modal (r) lebih besar dari pada pertumbuhan ekonomi (g), kecuali terdapat intervensi kebijakan progresif.

Teori-teori di atas menganalisis kondisi ketimpangan yang diukur dengan Rasio Gini dengan angka pertumbuhan ekonomi. Hanya dalam teori Piketty disyaratkan tingkat pengembalian modal tidak lebih besar dari pada pertumbuhan itu sendiri agar ketimpangan dapat menurun. Sedangkan dalam Ekonomi Islam terdapat konsep *adl* (keadilan) dan *maslahah* (kemanfaatan) yang harus diperhitungkan dalam pertumbuhan ekonomi⁷⁸. Realita yang terjadi di provinsi DKI Jakarta tahun 2024 cukup unik yang secara sekilas belum memperlihatkan teori Kuznet apalagi teori *trickle-down effect*. Tetapi Indonesia tidak menganut sistem kapitalisme murni untuk dapat menerima sepenuhnya teori Piketty⁷⁹. Konsep keadilan dan kemanfaatan publik dalam ekonomi Islam bisa jadi lebih cocok bagi negara seperti Indonesia.

2. Pengaruh Upah Minimum Regional (UMR) terhadap Rasio Gini

Kebijakan UMR dapat mengurangi ketimpangan pendapatan dengan meningkatkan pendapatan kelompok bawah. Studi yang dilakukan oleh Lazović Vuković dan Damijan (2025) menyebutkan bahwa UMR dan perlindungan tenaga kerja terbukti efektif mempersempit distribusi pendapatan.⁸⁰ Negara dengan perlindungan tenaga kerja yang kuat memiliki distribusi upah yang lebih sempit.

Menurut Anggraini et al. (2024), "IHDI dan UMK memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan, yang menunjukkan bahwa peningkatan dalam kedua variabel ini dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Provinsi DIY"⁸¹. Ini artinya peningkatan IHDI dan UMK mengurangi tingkat ketimpangan. Hasil

⁷⁸ "Abul Hassan & M. A. Choudhury, *Islamic Economics: Theory and Practice*" (London and New York: Routledge, 2019), 295; "Syed Nawab Haider Naqvi", "*On Raising the Level of Economic and Social Well-Being of the People*" (Islamabad: "Pakistan Institute of Development Economics", 1992), 153

⁷⁹ Thomas Piketty, *Capital e ideología* (Barcelona: Editorial Deusto, 2019) 206-209, ISBN: 9788423430956, <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=742544>

⁸⁰ Lazović Vuković & Damijan, *Drivers of Income Inequality in OECD countries: Testing the Milanovic's TOP hypothesis. Structural Change and Economic Dynamics*, 422. <https://doi.org/10.1016/j.strueco.2025.04.004>

⁸¹ Anggraini, Santosa, dan Citaningati, *Pengaruh Islamic Human Development Index, Pengangguran, Ketimpangan Pendapatan, dan Upah Minimum Kabupaten Terhadap Kemiskinan (Studi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2009 - 2022)*. 3145. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i3.15079>

dan temuan utama dari penelitian oleh Chang, N. et al mengungkapkan pengaruh signifikan dari UMR terhadap ketimpangan pendapatan dengan arah pengaruh negatif. Artinya, kenaikan UMR dapat menurunkan angka Rasio Gini. Semakin tinggi upah minimum yang ditetapkan, semakin merata distribusi pendapatan (Patricia, 2022). “UMR memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Artinya, semakin tinggi upah minimum yang diterapkan, semakin merata distribusi pendapatan”.⁸²

Studi laboratorium oleh Ezquerra et al. (2023) menunjukkan bahwa UMR dapat menjadi alat redistribusi pendapatan yang efektif, namun dampaknya tergantung pada desain kebijakan dan mekanisme komunikasi antara pekerja dan pengusaha.⁸³ UMR yang terlalu tinggi dapat menyebabkan efek negatif terhadap pekerja dengan keterampilan tinggi melalui mekanisme substitusi upah dan pekerjaan.⁸⁴

Dari penelitian-penelitian di atas terungkap bahwa peningkatan UMR memiliki pengaruh negatif terhadap angka Rasio Gini yang menjadi indikator ketimpangan. Ketika upah minimum dinaikkan, perbedaan pendapatan antara pekerja dengan kelompok yang lebih kaya dapat dipersempit. Pekerja yang berpenghasilan rendah akan mendapatkan upah lebih banyak saat upah minimum dinaikkan, sehingga kesenjangan antara mereka dan orang-orang yang memiliki pendapatan lebih tinggi menjadi lebih kecil. Inilah yang dikenal dengan teori upah minimum.⁸⁵ Akan tetapi jika melihat fenomena provinsi DKI Jakarta pada 2024 tingginya angka UMR saat itu tidak menjadikan Rasio Gini provinsi DKI Jakarta berada pada angka yang rendah.

⁸² Chang, Boediono, & Widianingsih, *Determinasi Makroekonomi dan Pajak Daerah*, 6(2), 9.

⁸³ Luis Ezquerra, José Gómez-Miñambres, Nuria Jimenez, & Pavel Kujal, *The Effect of Wage Proposals on Efficiency and Income Distribution*, (Amsterdam: Journal of Economic Behavior and Organization, 2023), 479–480. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2023.10.006>

⁸⁴ Gregory & Zierahn, *When the Minimum Wage Really Bites Hard: The Negative Spillover Effect on High-Skilled Workers*, 5–6, <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2021.104582>

⁸⁵ Putri dan Anggraini, *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kota Tanjungpinang*, (Tanjungpinang: Jurnal Manajerial Dan Bisnis, 2024), 102.

3. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Rasio Gini

Teori yang berkaitan dengan pengaruh IPM terhadap Rasio Gini adalah teori modal manusia atau *human capital*. Dimana IPM, yang berfungsi sebagai indikator utama dari kualitas sumber daya manusia di suatu negara, mencakup aspek-aspek seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup dengan pendapatan per kapita sebagai indikatornya. Investasi dalam modal manusia seperti peningkatan akses ke pendidikan dan layanan kesehatan dapat meningkatkan kesejahteraan setiap orang dan pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kondisi ini akan mengurangi angka rasio gini yang merupakan indikator ketimpangan pendapatan.

IPM berkontribusi terhadap pemerataan pendapatan menurut beberapa penelitian. Penelitian oleh Lazović Vuković & Damijan, 2025 menunjukkan pendidikan yang inklusif bisa menurunkan ketimpangan dalam jangka panjang, meskipun pada tahap awal bisa meningkatkan kesenjangan jika hanya dinikmati kalangan elit.⁸⁶ Bergougui et al., 2025 juga mengatakan bahwa investasi dalam pendidikan dan kesehatan yang merupakan komponen IPM menurunkan ketimpangan dalam jangka panjang. Namun, efeknya tergantung kualitas institusi dan akses terhadap layanan tersebut.⁸⁷

Prasetyo & Zuhdi, 2013, mengatakan secara tidak langsung IPM juga berdampak terhadap ketimpangan pendapatan. Akses pendidikan dan kesehatan yang lebih merata dapat meningkatkan mobilitas sosial dan mengurangi kesenjangan antar kelompok sosial. Dalam jangka panjang, investasi pada sektor-sektor ini menghasilkan dampak positif terhadap pemerataan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.⁸⁸ IPM berperan dalam mengurangi ketimpangan dengan memperluas akses terhadap hak-hak dasar manusia.

⁸⁶ Lazović, Vuković & Damijan, “Drivers of Income Inequality in OECD countries: Testing the Milanovic’s TOP hypothesis. *Structural Change and Economic Dynamics*”, 420. <https://doi.org/10.1016/j.strueco.2025.04.004>

⁸⁷ Brahim Bergougui, Ousama Ben-Salha, dan Syed Mansoob Murshed, *How Income Inequality Drives Climate Inequality in the World’s Largest Emitting Nations*, (Amsterdam: Journal of Cleaner Production, 2025), 3:145666. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2025.145666>

⁸⁸ Andi D. Prasetyo & U. Zuhdi, *The Government Expenditure Efficiency towards the Human Development*, (Amsterdam: Procedia Economics and Finance, 2013), 619. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(13\)00072-5](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(13)00072-5)

Pemerataan dalam kesehatan dan pendidikan membantu masyarakat miskin untuk keluar dari lingkaran kemiskinan struktural.⁸⁹

Hasil dan temuan utama dari penelitian Chang N, et al juga menunjukkan adanya pengaruh signifikan dari IPM terhadap ketimpangan dengan arah pengaruh negatif. Peningkatan IPM mendorong distribusi pendapatan yang lebih adil karena berhubungan erat dengan akses pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.⁹⁰ Begitu juga beberapa hasil penelitian, seperti Haidar (2024), Lestari (2024), Miliki et al. pada (2023), menemukan bahwa IPM yang lebih tinggi pada suatu daerah cenderung memiliki ketimpangan pendapatan yang lebih rendah dari pada daerah lain.

Meskipun logika teori dari beberapa hasil penelitian tadi, termasuk Anggia (2024), Miliki et al. (2023), Agam (2023), dan Diana (2023), menunjukkan bahwa menaikkan upah minimum dapat mengurangi kesenjangan pendapatan antara pekerja dan orang kaya.⁹¹ Tetapi fenomena provinsi DKI Jakarta pada 2024 berkata berbeda karena tingginya angka UMR dan IPM saat itu belum membawa provinsi DKI Jakarta pada angka Rasio Gini provinsi yang rendah.

4. Pengaruh PDB, UMR, dan IPM terhadap Rasio Gini

Penelitian yang membahas pengaruh PDB, UMR, dan IPM terhadap Rasio Gini secara khusus masih belum banyak ditemukan. Kebanyakan variabel-variabel independen dalam penelitian ini bercampur dengan variabel lain. Sehingga untuk melihat pengaruh simultan dari penelitian terdahulu dengan variabel yang sama juga tidak banyak ditemukan. Ada dua penelitian terdahulu yang khusus membahas dengan pembahasan yang sama dengan penelitian ini meskipun dengan lokasi yang berbeda.

⁸⁹ Andi D. Prasetyo & U. Zuhdi, *The Government Expenditure Efficiency towards the Human Development*, (Amsterdam: Procedia Economics and Finance, 2013), 617–618. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(13\)00072-5](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(13)00072-5)

⁹⁰ Chang, Boediono, & Widianingsih, *Determinasi Makroekonomi dan Pajak Daerah*, 6(2).

⁹¹ Putri dan Anggraini, *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kota Tanjungpinang*, (Tanjungpinang: Jurnal Manajerial Dan Bisnis, 2024),

Dari penelitian yang ditemukan, hasil uji simultan menunjukkan bahwa variabel independen—PDB, IPM, dan UMP—secara simultan berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan secara signifikan. Uji F yang menunjukkan nilai signifikan model regresi yang digunakan, mengindikasikan setidaknya terdapat satu dari variabel independen mempengaruhi variabel dependen.⁹² Maka dalam penelitian ini akan dibuktikan nanti apakah terdapat pengaruh simultan dari variabel-variabel independen (PDB, IPM, dan UMP) terhadap Rasio Gini.

Dalam perspektif Islam masalah ketimpangan pendapatan dihadapi dengan menekankan keadilan, keseimbangan, dan pengentasan kemiskinan. Ekonomi Islam menganjurkan distribusi kekayaan dan sumber daya yang adil, memastikan bahwa strategi pembangunan selaras dengan prinsip-prinsip Syariah untuk meminimalkan kesenjangan dan mempromosikan keadilan sosial di antara masyarakat.⁹³

Konsep ketimpangan dalam sudut pandang ekonomi islam, sebenarnya telah disebutkan secara tersirat dalam Qs. Al-Hasyr: 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. (سورة الحشر (٥٩): آية ٧)

⁹² Wijayanti dan Putri, “Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa Tahun 2017-2022”, 126–134. “<https://doi.org/10.20885/JKEK.vol2.iss2.art2>”, Berliana Ivanovi Sulistyaningrum, Ardito Bhinadi, dan Rini Dwi Astuti, *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum Provinsi terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2011–2020*, (Yogyakarta: Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan, 2023), 135–145. <https://doi.org/10.20885/JKEK.vol2.iss2.art3>

⁹³ Taufik Arnanda Marpaung, et al., *Strategi Pembangunan Nasional Terhadap Ketimpangan Ekonomi Antar Daerah Perspektif Ekonomi Islam*, (Baubau: Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 2 No. 1, Februari 2024).

Artinya: “harta *fai*’ (harta yang dihasilkan tanpa peperangan) apapun yang diberikan oleh Allah kepada Rasul-Nya dari harta penduduk desa maka itu adalah milik Allah, Rasul, para kerabat (beliau), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil (musafir), agar harta tersebut tidak berputar-putar di antara orang-orang kaya kalian (saja). Dan apa yang diberikan oleh Rasulullah maka ambillah dan apa yang dilarang maka hindari. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu maha pedih azab-Nya”.

Dalam tafsir Ar-razi, kata *دَوْلَةٌ* dalam ayat ini memiliki banyak makna, diantaranya istilah perputaran harta dan diantaranya istilah perpindahan kondisi. Maka ketika diartikan dengan makna perputaran harta maupun perpindahan harta, maksudnya adalah harta *fai*’ harus berputar dari tangan orang-orang kaya kepada orang-orang lainnya yang disebutkan oleh Allah *Subhanahu Wa Ta’ala*. diantaranya diberikan kepada pemimpin negara, para kerabat nabi yang tidak menerima zakat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan juga kepada para musafir. Artinya agar ekonomi berjalan maka harta kekayaan harus berputar dan tidak bisa hanya diam di tangan orang-orang tertentu sehingga memunculkan ketimpangan. Seiring dengan munculnya ketimpangan, maka terjadi pula penurunan kualitas keadilan, keseimbangan, dan pengentasan kemiskinan yang merupakan langkah solutif dalam perspektif Islam dalam permasalahan ketimpangan pendapatan.

Ayat ini menggunakan kata khusus, dengan lafadz harta *fai*’, untuk mewakili makna umum pada semua harta yang diberikan (Rasul/Allah)⁹⁴. Maka dapat dipahami makna ayat ini adalah segala harta yang diberikan Allah *Subhanahu Wa Ta’ala* harus bergerak dari orang kaya kepada orang-orang yang membutuhkan. Sehingga dengan pergerakan harta ini akan menggerakkan roda ekonomi dan mendatangkan kesejahteraan yang merata.⁹⁵ Dengan inilah distribusi kekayaan dan sumber daya yang adil terjadi.

⁹⁴ محمد بن عمر الرازي، (١٩٩٩). مفاتيح الغيب التفسير الكبير، جزء ٢٩ (بيروت: دار إحياء التراث العربي - الطبعة الثالثة - ١٤٢٠ هـ)، 607.

⁹⁵ <https://quranpedia.net/surah/1/59/book/352>

Berbeda dengan sistem ekonomi Barat yang lebih memperhatikan angka-angka pendapatan dalam tujuan pertumbuhan ekonominya. Dalam Islam, justru fokus pada PDB per kapita dan pertumbuhan ekonomi yang diukur secara tradisional bukanlah satu-satunya tujuan dari aktivitas ekonomi masyarakat. Ada aspek spiritual, moral, dan kemanusiaan yang sangat penting dalam setiap usaha ekonomi. Dalam ekonomi Islam, manusia tidak hanya hidup untuk memenuhi kebutuhan fisik semata. Tujuan dari kemajuan dan pembangunan disini adalah untuk mencapai kesejahteraan yang menyeluruh bagi individu dan masyarakat.⁹⁶

Dalam pandangan Islam, Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* adalah Pencipta segala sesuatu di dunia ini, dan semua ciptaan-Nya diberikan kepada manusia dari berbagai generasi sebagai amanah. Sebab itu, tanah dan sumber daya alam harus dikelola dengan cara yang memberikan manfaat secara adil bagi semua orang, termasuk generasi mendatang. Selain itu, memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas dan generasi yang akan datang dihormati sepenuhnya merupakan hal yang penting.

Salah satu prinsip utama dari hukum Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan diajarkan serta diamalkan oleh Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*. adalah keadilan. Dengan demikian, struktur kelembagaan dalam Islam dan ekonomi yang ideal harus mencerminkan keadilan. Oleh karena itu, upaya untuk mempromosikan pembangunan sosial dan kesejahteraan manusia harus didasarkan pada aturan yang mendukung keadilan. Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*. memahami pentingnya pesan ini untuk mendorong dan menanamkan nilai keadilan dalam masyarakat, seperti yang ditekankan dalam Al-Quran. Ia mengajarkan tanggung jawab individu, kolektif, dan negara dalam mencapai tujuan tersebut. Prinsip yang telah menjadi bagian dari ajaran Islam ini, telah mendapat pengakuan pada akhir tahun 1970an dalam karya-karya Mahbub ul-Haq, Amartya Sen, dan beberapa ekonom lainnya dalam konteks ekonomi konvensional.⁹⁷

⁹⁶ Askari, Iqbal, Mirakhor, et al., *Introduction to Islamic Economic*, 20

⁹⁷ Askari, Iqbal, Mirakhor, et al., *Introduction to Islamic Economic*, 19-20

Asy-Syaibaani seorang tokoh ekonomi Islam menyebutkan dalam manuskripnya “*al-kasb*” mengenai konsep keadilan dalam tindakan ekonomi. Beliau menyebutkan secara umum tindakan yang dilarang dilakukan terhadap semua kebutuhan ekonomi, yaitu: merusak (*ifsad*), berlebihan (*israf*), merasa hebat (*makhilah*), sombong (*tafaakhour*), dan kebanyakan-banyakan (*takaatsur*). *Asy-Syaibaani* juga menyebutkan konsep keadilan dalam 3 tingkatan konsumsi secara umum yaitu: konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup, konsumsi untuk menguatkan ibadah setelah memenuhi kebutuhan hidup, dan konsumsi sampai kepada tingkat berlebihan dan merusak. Yang Ketika merupakan hal yang dilarang dalam ekonomi Islam. Dalam al-Quran sendiri telah disebutkan mengenai kebutuhan konsumsi dalam Q.S. Al-Furqon: 67, yaitu: “dan orang-orang yang menafkahkan hartanya tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu kekurangan (irit), dan di antara keduanya adalah seimbang/adil”. Ayat ini menyebutkan sifat hamba Allah yang dimulai dari ayat 63. Perilaku konsumsi yang adil inilah yang disebutkan oleh Imam *Asy-Syaibaani* yang diperbolehkan dalam ekonomi Islam yaitu semua konsumsi yang berada di antara batas yang tidak sampai kepada kekurangan pemenuhan kebutuhan ketika ada kemampuan dan batas tidak sampai kepada berlebihan dan merusak.⁹⁸ Ketika keadilan terwujud maka manfaat atau *maslahah* akan terwujud pula. Jika *maslahah* tidak terwujud maka ketidakadilan dan kerusakan yang akan muncul.

Maka konsep pemberantasan ketimpangan sosial dalam Islam adalah adanya prinsip Keadilan dan Kesetaraan dalam Islam sesuai dengan kaidah fiqih adil serta *maslahah*. Perintah adil sendiri disebutkan secara langsung dalam al-Quran S. An-nahl ayat 90:

⁹⁸ Muhammad bin Hasan Asy-Asyaibaani, *El-Kasb*. (Beirut-Libanon: Dar el-basyaaer el-Islamiah, 1997) 5, 80–81., Muhammad bin Hasan Asy-Asyaibaani, *El-Iktisab fi er-Rizq el-Mustathob*. (Beirut-Libanon: Dar el-kotoub el-ilmiah, 1986) 38–39, 40.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾ النحل: 90

Artinya: “sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan kebaikan, memberi (kebaikan) kepada kerabat, dan mencegah kekejian, kemungkaran, dan penindasan. Ia memberi kalian nasehat mulia, mudah-mudahan kalian mengingat(nya)”.

Keadilan, baik dalam aspek sosial maupun ekonomi, merupakan dasar dari sistem ekonomi Islam. Dalam Al-Quran, gambaran keadilan disebutkan dengan dua istilah yaitu: *qist* dan *adl*. Istilah pertama, *qist*, menggambarkan hubungan yang baik antara manusia dan interaksi mereka dengan makhluk lainnya. Ini adalah fenomena yang berkaitan dengan perilaku manusia dan bukan merupakan sifat ilahi. Sementara itu, kata *adl* mencerminkan tindakan Sang Pencipta yang terlihat dalam keseimbangan sempurna di alam semesta; ini menggambarkan cara-Nya menempatkan segala sesuatu pada posisinya yang tepat. Setiap ketidakadilan yang dilakukan oleh individu terhadap sesama manusia atau terhadap makhluk lainnya pada akhirnya akan berbalik menjadi ketidakadilan terhadap diri mereka sendiri. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* sangat mencintai keadilan, yang merupakan bagian esensial dari sifat-Nya.⁹⁹ Ekonomi Islam menganjurkan distribusi kekayaan dan sumber daya yang adil, memastikan bahwa strategi pembangunan selaras dengan prinsip-prinsip *syariah* untuk meminimalkan kesenjangan dan mempromosikan keadilan sosial di antara masyarakat.¹⁰⁰

Sementara *Maslahah* merupakan kaidah yang masuk ke dalam salah satu kaidah fiqh *kulliyah* yang lima yaitu *الضرر يزل*. D. Al-Buti dalam Anwar al-Jaff (2019) mendefinisikan *maslahah* sebagai “manfaat yang dimaksud peletak syariat yang bijaksana kepada hamba-Nya berupa bagian dari penjagaan agama, diri/nyawa, akal, keturunan, dan harta sesuai dengan urutannya”. Ketika salah satu dari lima poin yang dikenal dengan *maqashid syariah* ini hilang maka akan muncul

⁹⁹ Askari, Iqbal, Mirakhor, et al., *Introduction to Islamic Economic*, 76

¹⁰⁰ Marpaung, et al., *Strategi Pembangunan Nasional Terhadap Ketimpangan Ekonomi Antar Daerah Perspektif Ekonomi Islam*, (Baubau: Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 2 No. 1, Februari 2024).

mafsadah atau kerusakan. Konsep *adl* (keadilan) dan *maslahah* (kemanfaatan) ini menghendaki bahwa pertumbuhan ekonomi harus memperhatikan keseimbangan sosial dan distribusi kekayaan.¹⁰¹ Penelitian dari Hilmiatus Sahla (2024) mengungkapkan bahwa Distribusi pendapatan yang tidak merata memperburuk kemiskinan. Risma (2024) menyatakan dalam penelitiannya bahwa kemiskinan di DKI Jakarta dan Jawa Barat berpengaruh positif signifikan terhadap kriminalitas. Bahkan penelitian Agung (2021) menyatakan bahwa ketimpangan ekonomi meningkatkan kriminalitas melalui tekanan psikologis dan kecemburuan sosial. Begitu juga dengan Prawidya (2016) menyatakan dalam penelitiannya bahwa Gini Ratio berpengaruh positif signifikan terhadap kriminalitas.

Maka salah satu bentuk perwujudan adil dan *maslahah* adalah keadilan dan kesetaraan dalam akses fasilitas sosial untuk membangun setiap individu sebagai modal manusia. Fasilitas yang dibutuhkan adalah fasilitas Kesehatan, fasilitas Pendidikan, dan fasilitas taraf hidup yang layak.¹⁰² Di Indonesia sendiri taraf kelayakan hidup diukur dengan nilai UMR untuk pekerja sektor formal. Sedangkan ketiga fasilitas sosial, yaitu fasilitas Kesehatan, fasilitas Pendidikan, dan fasilitas taraf hidup layak merupakan kesatuan ukuran pembangunan manusia atau disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (BPS Kabupaten Pidie, 2023).

Studi-studi mengenai sejauh apa pengaruh fasilitas sosial, yang merupakan ukuran pembangunan manusia, terhadap angka rasio gini telah dilakukan oleh banyak peneliti. Termasuk di dalamnya studi mengenai pengaruh ukuran taraf kelayakan hidup untuk pekerja sektor formal terhadap rasio gini. Pada penelitian mengenai pengaruh Upah Minimum Regional (UMR) ada dua hasil yang berbeda. Penelitian dari Anggia (2024), Agam (2023), dan Diana (2023) menunjukkan bahwa UMR berpengaruh negatif terhadap Rasio Gini. Hasil ini yang sesuai dengan teori pasar tenaga kerja. Sementara itu penelitian dari Evanty (2023) memaparkan hasil yang tidak signifikan dari pengaruh UMR terhadap Rasio Gini meskipun menunjukkan arah positif.

¹⁰¹ Hassan & Choudhury, *Islamic Economics: Theory and Practice*, 295; Syed Nawab Haider Naqvi, *On Raising the Level of Economic and Social Well-Being of the People* (Islamabad: Pakistan Institute of Development Economics, 1992), 153

¹⁰² https://nursyamcentre.com/artikel/khazanah/fikih_sdgs_dan_ketimpangan_sosial

Sedangkan penelitian mengenai pengaruh IPM juga memiliki beberapa hasil yang variatif. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Farhan (2022) memastikan bahwa IPM memiliki pengaruh terhadap Indeks Gini. Lestari (2024) menunjukkan bahwa *Human Development Index* berpengaruh terhadap penurunan ketimpangan yang sesuai dengan teori modal manusia. Begitu juga penelitian dari Haidar (2024) yang menunjukkan pengaruh IPM yang signifikan dengan arah negatif terhadap ketimpangan. Sementara itu, penelitian dari Muara Ati (2024), Monika (2023), Agam (2023), dan Aprillia (2022) menunjukkan pengaruh positif signifikan dari IPM terhadap ketimpangan pendapatan.

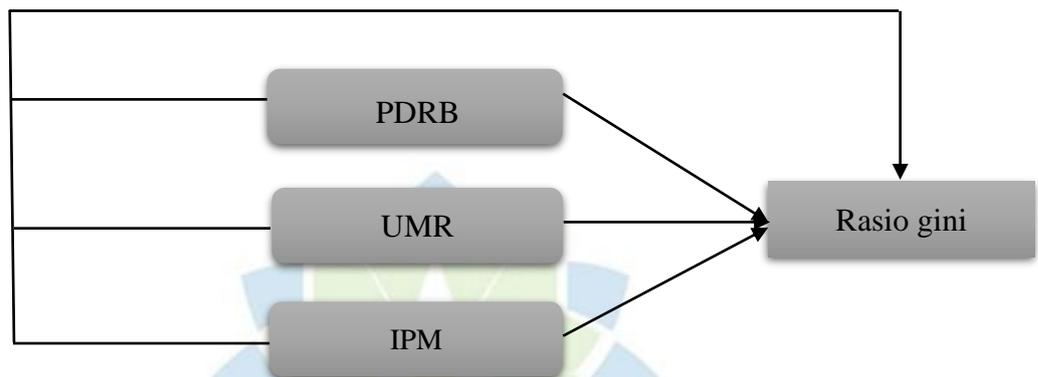
Maka dari pemahaman tadi, dalam ekonomi Islam tidak hanya Pendapatan saja yang menjadi ukuran pertumbuhan ekonomi yang menjadi tujuan. Akan tetapi ada banyak hal-hal lain yang menjadi tujuan ekonomi selama membawa kepada keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan hal ini ditunjukkan dengan rendahnya angka Rasio Gini sebagai indikator ketimpangan ekonomi. Diantara variabel-variabel penting dalam mengukur kesejahteraan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencakup Upah Minimum Regional (UMR) yang merupakan indikator keadilan dan kesetaraan dalam akses fasilitas sosial untuk membangun setiap individu sebagai salah satu bentuk perwujudan adil dan *maslahah*.¹⁰³ Dalam mendukung pandangan ini, terdapat pandangan dari sumber lain. Celios misalnya, mengatakan bahwa ketimpangan pendapatan di Indonesia terjadi karena beberapa faktor, di antaranya adalah ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi, yang menyebabkan kesenjangan antara daerah terutama perkotaan dan pedesaan. Kesenjangan terhadap akses pendidikan dan layanan kesehatan juga menjadi penyebab ketimpangan pendapatan. Masyarakat yang tidak memiliki cukup akses terhadap pendidikan berkualitas cenderung terjebak dalam siklus kemiskinan.¹⁰⁴

¹⁰³ https://nursyamcentre.com/artikel/khazanah/fikih_sdgs_dan_ketimpangan_sosial

¹⁰⁴ Askar, Muhammad, Achmad, dan Imaduddin, *Laporan Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2024: Pesawat Jet untuk Si Kaya, Sepeda untuk Si Miskin*, 7-11. Retrieved from <https://www.celios.co.id>

Maka dalam penelitian ini akan dilakukan pengujian kembali untuk melihat seperti apa pengaruh PDRB, UMR, dan IPM yang sebenarnya terhadap rasio gini DKI Jakarta. Adapun ilustrasi kerangka pikir tersebut adalah tertuang dalam model penelitian sebagai berikut:

Model Penelitian



Gambar 1.3 Skema kerangka pemikiran penelitian

Dari kerangka pemikiran ini akan muncul beberapa hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini.

F. Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang dapat dirumuskan berdasarkan kerangka pemikiran yang telah disebutkan sebagai berikut:

1. H₀: PDRB tidak memiliki pengaruh terhadap Rasio Gini di provinsi DKI Jakarta
Ha: PDRB memiliki pengaruh terhadap Rasio Gini di provinsi DKI Jakarta
2. H₀: UMR tidak memiliki pengaruh terhadap Rasio Gini di provinsi DKI Jakarta
Ha: UMR memiliki pengaruh terhadap Rasio Gini di provinsi DKI Jakarta
3. H₀: IPM tidak memiliki pengaruh terhadap Rasio Gini di provinsi DKI Jakarta
Ha: IPM memiliki pengaruh terhadap Rasio Gini di provinsi DKI Jakarta
4. H₀: tidak terdapat pengaruh antara PDRB, UMR, dan IPM terhadap Rasio Gini di provinsi DKI Jakarta.

Ha: terdapat pengaruh antara PDRB, UMR, dan IPM terhadap Rasio Gini di provinsi DKI Jakarta.

